

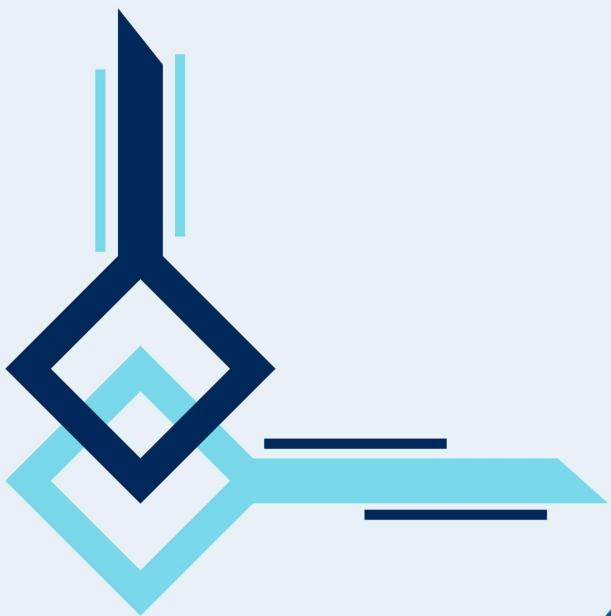


**BAPPELITBANGDA  
KAB. PASAMAN BARAT**

# **LAPORAN KINERJA**

**BAPPELITBANGDA  
KAB. PASAMAN BARAT**

**TAHUN 2023**





PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT

# INSPEKTORAT

Jln. Soekarno Hatta No. 29 Telp.(0753) 466169 Fax. (0753) 466170  
Simpang Empat – Pasaman Barat 26566

## PERNYATAAN TELAH DIREVIU

### LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

### BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

### DAERAH (BAPPELITBANGDA) KABUPATEN PASAMAN BARAT

TAHUN ANGGARAN 2023

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPELITBANGDA) Kabupaten Pasaman Barat untuk periode tahun 2023 sesuai pedoman reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPELITBANGDA) Kabupaten Pasaman Barat.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan yang terbatas bahwa Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan didalam laporan kinerja ini.

Simpang Empat, 28 Maret 2024  
INSPEKTUR DAERAH,  
  
EMNITA NADIRUA, SE, MM, CGCAE  
Pembina (IV/a)  
NIP. 19750831 200604 2 005

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan kinerja Bappelitbangda merupakan penjabaran pencapaian target dan realisasi indikator sasaran, program/kegiatan/subkegiatan yang telah direncanakan pada dokumen Rencana Kerja Bappelitbangda Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2023. Pada tahun 2023, Bappelitbangda melaksanakan 3 sasaran strategis dengan 9 indikator sasaran, 4 program, 16 kegiatan dan 42 subkegiatan. Sebelum perubahan Renja tahun 2023, semua OPD diinstruksikan untuk memotong anggarannya untuk mencukupi defisit anggaran di Kabupaten.

### Capaian Kinerja

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai perangkat daerah yang mengurus bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah, capaian kinerja Bappelitbangda tahun 2023 memiliki 3 sasaran strategis yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya kinerja perencanaan pembangunan daerah, diukur melalui tiga indikator. Pertama, persentase tingkat keselarasan dokumen perencanaan jangka menengah dan tahunan daerah dengan dokumen perencanaan Perangkat Daerah. Persentase ini menghitung jumlah OPD yang memiliki nilai dokumen perencanaan minimal baik. Capaian sasaran ini berhasil sebesar 103,63% dengan realisasi sebesar 88,09% dan target sebesar 85%. Kedua, persentase capaian IKU daerah sebesar 48,15% dari target 100%. Ketiga, persentase pencapaian nilai komponen perencanaan pada penilaian SAKIP sebesar 78% dari target sebesar 81% atau indikator sasaran ini tidak tercapai.
2. Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya peran kelitbangan dan inovasi dalam pembangunan, diukur melalui persentase implementasi kelitbangan yang mendapat realisasi sebesar 100% dari target sebesar 90% atau indikator sasaran ini berhasil dicapai. Kedua, diukur melalui kategori capaian IGA yang mendapatkan predikat “Inovatif”. Indikator sasaran ini juga berhasil dicapai sesuai target pada tahun 2023.
3. Sasaran Strategis 3 : Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Bappelitbangda, diukur melalui empat indikator sasaran. Nilai SAKIP Bappelitbangda dengan nilai BB berhasil melebihi sesuai target. Level Maturitas SPIP Bappelitbangda masih berada pada level 3 dan berhasil dicapai sesuai target. Persentase penurunan jumlah temuan BPK atas laporan keuangan Bappelitbangda sebesar 100% dari target 75% atau indikator sasaran ini berhasil dicapai. Yang terakhir adalah indikator sasaran baru yang ditambahkan pada Perubahan Renstra Bappelitbangda tahun 2021-2026 yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 81,94 berhasil dicapai melebihi target sebesar 80%.



Sumber : data diolah Bappelitbangda, 2024

Pagu Bappelitbangda Kabupaten Pasaman Barat tahun 2023 adalah sebesar Rp6.300.189.555,00 yang direalisasikan sebesar Rp5.522.959.976,00 atau sebesar 87,66%. Artinya terdapat sisa anggaran sebesar Rp777.229.579,00 atau sebesar 12,34%. Efisiensi dilakukan pada belanja perjalanan dinas, belanja ATK, cetak dan penggandaan, pengadaan pakaian dinas dan pengadaan kendaraan dinas jabatan atau operasional.

### **Upaya Perbaikan Kinerja Ke Depan**

1. Meningkatkan koordinasi penyusunan dan reviu dokumen perencanaan pembangunan
2. Meningkatkan evaluasi Renja dalam rangka pengendalian pelaksanaan program/kegiatan/subkegiatan
3. Meningkatkan kualitas JF Peneliti dan mendukung Peneliti baik secara anggaran maupun komitmen pimpinan untuk menghasilkan data dan kajian berkualitas dalam rangka menunjang perencanaan pembangunan
4. Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan dan laporan kinerja sesuai pedoman peraturan yang berlaku
5. Memaksimalkan aplikasi perencanaan agar setiap tahapan perencanaan sinkron, selaras dan terintegrasi serta sesuai jadwal kalender perencanaan.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Penyusunan Laporan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPELITBANGDA) Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2023 dapat diselesaikan tepat waktu.

Bappelitbangda Kabupaten Pasaman Barat sebagai salah satu unit eselon II berkewajiban menyusun Laporan Kinerja dalam rangka mendukung terselenggaranya tata kelola pemerintah yang baik (*good governance*). Penyusunan Laporan Kinerja merupakan wujud pertanggungjawaban atas program dan kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun 2023.

Selain laporan kinerja, pengukuran kinerja Bappelitbangda Kabupaten Pasaman Barat juga dipantau dari Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menjadi kontrak kinerja Kepala Bappelitbangda Kabupaten Pasaman Barat dengan Bupati.

Dengan melaksanakan pelaporan, pengukuran, dan evaluasi pencapaian kinerja ini, diharapkan dapat memberikan informasi yang transparan dan akuntabel bagi semua pihak mengenai kinerja Bappelitbangda Kabupaten Pasaman Barat. Kami mengharapkan adanya masukan-masukan dari semua pihak untuk memperbaiki kinerja Bappelitbangda Kabupaten Pasaman Barat dimasa mendatang.

**Simpang Empat, 29 Februari 2024**

**Plt. KEPALA BAPPELITBANGDA  
KABUPATEN PASAMAN BARAT**



**DR. IKHWANRI, M.Pd**

**NIP. 19701017 200012 1 001**

## **DAFTAR ISI**

Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi .....	ii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Gambaran Organisasi.....	1
1.2.1 Dasar Pembentukan Instansi .....	1
1.2.2 Tugas Pokok dan Fungsi .....	1
1.2.3 Sumber Daya Aparatur .....	7
1.2.4 Aspek Strategis dan Isu Strategis .....	11
1.3 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja .....	12
1.4 Sistematika Penulisan .....	12
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA .....</b>	<b>14</b>
2.1 Perencanaan Kinerja Jangka Menengah .....	14
2.2 Tujuan dan Sasaran .....	14
2.3 Realisasi Kinerja Indikator Utama .....	15
2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2023.....	16
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....</b>	<b>19</b>
3.1 Capaian Kinerja Organisasi.....	19
3.2 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023 .....	19
3.3 Analisis Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Lalu .....	23
3.4 Analisis Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Target Renstra .....	27
3.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan .....	30
3.6 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya .....	38
3.7 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun kegagalan Pencapaian .....	38
3.8 Realisasi Anggaran .....	43
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>49</b>
4.1 Kesimpulan .....	49
4.2 Strategi Pemecahan Masalah .....	49

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1.1 Kondisi Kepegawaian Bappelitbangda Tahun 2023 .....	7
Tabel 1.2 Komposisi Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan .....	7
Tabel 1.3 Komposisi Pegawai berdasarkan Golongan .....	8
Tabel 1.4 Komposisi Pegawai berdasarkan Jenis Kelamin .....	8
Tabel 1.5 Isu Strategis Bappelitbangda Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026 .....	11
Tabel 2.1.Tujuan dan Sasaran Bappelitbangda yang mengacu pada Misi Bupati Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021 – 2026 .....	14
Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Bappelitbangda Tahun 2023 .....	16
Tabel 2.3 Alokasi Anggaran berdasarkan Program dan Kegiatan Bappelitbangda Tahun 2023 .....	17
Tabel 3.1 Skala Penilaian Capaian Kinerja .....	19
Tabel 3.2 Penilaian Capaian Kinerja Bappelitbangda Tahun 2023 .....	20
Tabel 3.3 Capaian Sasaran Tahun dengan Tahun Lalu .....	25
Tabel 3.4 Capaian Sasaran Tahun dengan Target Renstra .....	29
Tabel 3.5 Perkembangan Capaian Persentase Tingkat Keselarasan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah dan Tahunan Daerah Dengan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tahun 2021-2023 .....	30
Tabel 3.6 Perkembangan Capaian IKU Daerah Tahun 2021-2023 .....	32
Tabel 3.7 Perkembangan Persentase Pencapaian Nilai Komponen Perencanaan pada penilaian SAKIP Tahun 2021-2023 .....	33
Tabel 3.8 Perkembangan Kajian Kelitbangsaan Tahun 2021-2023 .....	34
Tabel 3.9 Perkembangan Capaian IGA Tahun 2021-2023 .....	35
Tabel 3.10 Perkembangan Nilai SAKIP Bappelitbangda Tahun 2021-2023 .....	36
Tabel 3.11 Perkembangan Capaian Level Maturitas SPIP Bappelitbangda Tahun 2021-2023 .....	37
Tabel 3.12 Perkembangan Capaian Penurunan Jumlah Temuan BPAK atas Laporan Keuangan Bappelitbangda Tahun 2021-2023 .....	37
Tabel 3.13 Perkembangan Capaian IKM Tahun 2021-2023 .....	38
Tabel 3.14 Capaian Realisasi Kinerja Bappelitbangda Level Program/Kegiatan/ Subkegiatan .....	44

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Sesuai amanat Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tahapan perencanaan pembangunan terdiri atas penyusunan rencana, penetapan rencana, pengendalian pelaksanaan rencana dan evaluasi pelaksanaan rencana. Tiap-tiap daerah provinsi, kabupaten/kota menyusun rencana pembangunan jangka panjang, menengah dan tahunan. Dokumen rencana pembangunan yang telah disusun dan ditetapkan kemudian dievaluasi. Di tingkat Perangkat Daerah (PD), dokumen rencana kerja yang disusun setiap tahun (RENJA PD) dievaluasi sesuai tujuan perencanaan pembangunan yaitu menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Hasil evaluasi menjadi bahan penyusunan rencana pembangunan untuk periode berikutnya.

Rencana Strategis (Renstra) Bappelitbangda periode 2021-2026 menjadi pedoman dalam dokumen Renja Bappelitbangda tahun 2023. Berdasarkan dokumen Renstra Bappelitbangda periode tahun 2021-2026, tujuan Bappelitbangda yaitu meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah, meningkatkan implementasi kelitbangda dan inovasi daerah, meningkatkan akuntabilitas kinerja Bappelitbangda. Untuk mendukung tercapainya tujuan tersebut disusunlah 3 sasaran dengan 9 indikator sasaran dan terdapat 4 program, 16 kegiatan dan 42 subkegiatan pada Renja Bappelitbangda tahun 2023. Atas dasar dokumen Renja Bappelitbangda tahun 2023 tersebut, disusunlah laporan kinerja Bappelitbangda tahun 2023 sebagai laporan pertanggungjawaban atas rencana kerja tahun 2023 yang telah disusun.

#### **1.2 Gambaran Organisasi**

##### **1.2.1 Dasar Pembentukan Organisasi**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pasaman Barat dan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 14 Tahun 2011 tentang Organisasi Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pasaman Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 14 Tahun 2012 dibentuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Pasaman Barat dengan tugas dan fungsinya membantu Pemerintah Daerah dalam urusan perencanaan pembangunan daerah. Pada tahun 2022 Bappeda kabupaten Pasaman Barat mengalami perubahan nomenklatur menjadi Bappelitbangda (Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah) berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2022. Hal ini lebih memfokuskan Bappelitbangda mengemban dua tugas utama, yaitu bidang perencanaan dan penelitian.

##### **1.2.2 Tugas Pokok dan Fungsi**

Berdasarkan Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 63 tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, tugas pokok dan fungsi Bappelitbangda yaitu melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang fungsi penunjang perencanaan pembangunan, dan bidang penelitian dan pengembangan daerah meliputi:

- a. Merumuskan perencanaan strategis pada bidang perencanaan pembangunan dan penelitian dan pengembangan daerah;
- b. Menyelenggarakan urusan Pemerintahan dan Pelayanan umum bidang perencanaan pembangunan dan penelitian dan pengembangan daerah;

- c. Melakukan pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah;
- d. Melaksanakan pengawasan, pengendalian serta evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah;
- e. Melaksanakan Standar Pelayanan Minimal yang wajib dilaksanakan bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah;
- f. Melaksanakan Pengendalian dan Evaluasi di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah;
- g. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tata laksana pelaksanaan tugas pada Bappelitbangda terdiri dari:

1. Kepala Badan

Kepala Badan berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam menentukan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan daerah dan pengendalian kegiatan daerah karena sifatnya tidak tercakup oleh Sekretariat Daerah serta melakukan evaluasi atas pelaksanaannya.

Kepala Bappelitbangda menyelenggarakan fungsi :

- 1) Membantu kepala daerah dalam melaksanakan kewenangan di bidang perencanaan pembangunan daerah, yang meliputi perumusan kebijakan daerah serta penyusunan program pembangunan daerah.
- 2) Memberikan data dan informasi mengenai pelayanan umum di bidang perencanaan pembangunan daerah serta memberikan saran dan pertimbangan kepala daerah sebagai bahan dalam mengambil keputusan.
- 3) Memimpin, mengoordinasikan, mengendalikan serta mengawasi semua kegiatan perencanaan pembangunan daerah.
- 4) Melaksanakan konsultasi perencanaan dan perencanaan pembangunan daerah.
- 5) Mempertanggungjawabkan tugas dinas baik teknis operasional maupun fungsional kepada atasan.
- 6) Memelihara dan mengupayakan peningkatan kinerja pegawai, disiplin, meningkatkan, loyalitas dan kejujuran.
- 7) Membina unsur-unsur perencanaan pembangunan daerah dan mengembangkan tugas-tugas dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 8) Menjalin kerjasama dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal untuk kepentingan dinas dalam kelancaran pelaksanaan tugas.
- 9) Melaksanakan usaha tata dinas dan pengelolaan unit pelaksana teknis serta memberikan pembinaan dan bimbingan terhadap kelompok jabatan fungsional.
- 10) Mengusulkan penetapan pegawai dalam jabatan tertentu.
- 11) Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

2. Bagian Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bappelitbangda. Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam mengoordinasikan rencana kegiatan, memberikan pelayanan, urusan umum dan kepegawaian, keuangan, pelaporan serta penyelenggaraan tugas-tugas secara terpadu dan tugas-tugas administratif di lingkungan badan.

Dalam melaksanakan tugas, Sekretaris menjalankan fungsi :

- a. Pengoordinasian penyusunan rencana dan program anggaran Badan;

- b. Pengoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu;
- c. Pengelolaan administrasi surat-menyurat, kearsipan, kepegawaian, perlengkapan dan asset serta urusan rumah tangga badan;
- d. Pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi rencana anggaran, pembukuan, pertanggungjawaban dan laporan keuangan;
- e. Penyiapan data bahan evaluasi dan laporan kegiatan Badan secara berkala sebagai pertanggungjawaban tugas pada atasan;
- f. Pengoordinasian penyusunan draf rancangan peraturan daerah di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah;
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugas dan fungsi.

Dalam melaksanaan tugas dan fungsi di atas Bagian Sekretariat dibantu oleh 3 (tiga) Sub Bagian yaitu :

- 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- 2) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Keuangan
- 3) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Program

3. Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan dipimpin oleh kepala bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris Badan. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan mempunyai tugas berkaitan dengan perencanaan pembangunan, pengendalian kegiatan dan program pembangunan dan evaluasi pelaksanaan program pembangunan daerah. Dalam melaksanakan tugasnya, bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan mempunyai fungsi :

- a) Mengoordinasikan pelaksanaan perumusan dokumen rancangan awal Rencana Pembangunan Daerah (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah)/Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/ Rencana Kerja Pembangunan Daerah);
- b) Menetapkan petunjuk pelaksanaan secara makro di bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
- c) Melaksanakan analisa dan pengkajian perencanaan dan pendanaan Pembangunan Daerah;
- d) Mengintegrasikan dan harmonisasi program-program pembangunan daerah;
- e) Melaksanakan dan mengamankan data informasi pembangunan daerah;
- f) Melaksanakan pengamanan data melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi;
- g) Merumuskan kebijakan pelaksanaan standar pelayanan minimal di bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan;
- h) Mengoordinasikan pelaksanaan pengolahan data dan informasi perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan;
- i) Mengoordinasikan pelaksanaan penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah/Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/ Rencana Kerja Pembangunan Daerah);
- j) Mengoordinasikan pelaksanaan sinkronisasi penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Daerah (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah / Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah / Rencana Kerja Pembangunan Daerah) pada organisasi perangkat daerah;
- k) Mengoordinasikan pelaksanaan evaluasi dokumen Rencana Pembangunan Daerah (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah / Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah / Rencana Kerja Pembangunan Daerah) pada organisasi perangkat daerah ;

- l) Mengoordinasikan Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi pencapaian Kinerja dokumen Rencana Pembangunan Daerah (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah) / Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/Rencana Kerja Pembangunan Daerah);
- m) Melaksanakan konsultasi dan koordinasi terkait dengan penyusunan dan pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah/ Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah / Rencana Kerja Pembangunan Daerah) dengan instansi pemerintah yang lebih tinggi;
- n) Mengoordinasikan pelaksanaan penjaringan aspirasi masyarakat melalui forum musyawarah pembangunan dan forum organisasi perangkat kerja daerah;
- o) Mengoordinasikan penetapan petunjuk teknis monitoring dan evaluasi pembangunan daerah;
- p) Melaksanakan fungsi lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tupoksinya, terdapat 3 (tiga) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi di bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan yaitu :

- 1) Sub-Substansi Data dan Informasi
- 2) Sub-Substansi Pendanaan dan Pembangunan
- 3) Sub-Substansi Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan
- 4. Bidang Pemerintah dan Pembangunan Manusia
 

Bidang Pemerintah dan Pembangunan Manusia mempunyai tugas yang berkaitan perencanaan, penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia. Bidang Pemerintah dan Pembangunan Manusia mempunyai fungsi :

  - a) Menetapkan petunjuk pelaksanaan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
  - b) Merumuskan kebijakan pelaksanaan standar pelayanan minimal di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
  - c) Melaksanakan pengolahan data dan informasi perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
  - d) Merumuskan rencana kerja jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
  - e) Mengoordinasikan perencanaan, pengendalian dan evaluasi kerja badan di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
  - f) Menyiapkan sinkronisasi penyusunan dokumen rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek pada organisasi perangkat daerah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
  - g) Melaksanakan evaluasi dokumen rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek pada organisasi perangkat daerah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
  - h) Melaksanakan pengendalian dan evaluasi pencapaian kinerja pembangunan daerah jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
  - i) Mengoordinasikan evaluasi pencapaian kinerja pembangunan daerah jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek pada organisasi perangkat daerah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
  - j) Melaksanakan konsultasi dan koordinasi dokumen rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek bidang pemerintahan dan pembangunan manusia dengan instansi pemerintah yang lebih tinggi;

- k) Melaksanakan kerjasama perencanaan pembangunan sosial pemerintahan dan pembangunan manusia antar daerah kabupaten dan antar daerah dengan swasta, dalam dan luar negeri;
- l) Melaksanakan penjaringan aspirasi masyarakat melalui forum musyawarah pembangunan dan forum organisasi perangkat kerja daerah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- m) Menetapkan petunjuk teknis monitoring dan evaluasi pembangunan daerah di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- n) Melaksanakan fungsi lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Di dalam pelaksanaan tugas, bidang Pemerintah dan Pembangunan Manusia dibantu dan membawahi 3 (tiga) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi yaitu:

- 1) Sub Bidang Pemerintahan
- 2) Sub-Substansi Pembangunan Manusia
- 3) Sub-Substansi Kesejahteraan Rakyat

5. Bidang Ekonomi, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahannya

Bidang Ekonomi, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahannya mempunyai tugas berkaitan dengan peningkatan infrastruktur melalui pengembangan wilayah yang meliputi perencanaan sarana dan prasarana wilayah, tata ruang dan lingkungan hidup, serta perencanaan kawasan permukiman. Bidang Ekonomi, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahannya mempunyai fungsi :

- a) Menetapkan petunjuk pelaksanaan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah di bidang perekonomian, Sumber Daya Alam, infrastruktur dan kewilayahannya;
- b) Merumuskan kebijakan pelaksanaan standar pelayanan minimal di bidang perekonomian, Sumber Daya Alam, infrastruktur dan kewilayahannya;
- c) Melaksanakan pengolahan data dan informasi perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan bidang perekonomian, Sumber Daya Alam, infrastruktur dan kewilayahannya;
- d) Merumuskan rencana kerja jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek bidang perekonomian, Sumber Daya Alam, infrastruktur dan kewilayahannya;
- e) Mengoordinasikan perencanaan, pengendalian dan evaluasi kerja badan di bidang perekonomian, Sumber Daya Alam, infrastruktur dan kewilayahannya;
- f) Melaksanakan sinkronisasi penyusunaan dokumen rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek pada organisasi perangkat daerah bidang perekonomian, Sumber Daya Alam, infrastruktur dan kewilayahannya;
- g) Melaksanakan evaluasi dokumen rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek pada organisasi perangkat daerah bidang perekonomian, Sumber Daya Alam, infrastruktur dan kewilayahannya;
- h) Melaksanakan pengendalian dan evaluasi pencapaian kinerja pembangunan daerah jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek bidang perekonomian, Sumber Daya Alam, infrastruktur dan kewilayahannya;
- i) Mengoordinasikan evaluasi pencapaian kinerja pembangunan daerah jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek pada organisasi perangkat daerah bidang perekonomian, Sumber Daya Alam, infrastruktur dan kewilayahannya;
- j) Melaksanakan konsultasi dan koordinasi dokumen rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek bidang perekonomian, Sumber Daya Alam, infrastruktur dan kewilayahannya dengan instansi pemerintah yang lebih tinggi;

- k) Melaksanakan kerjasama perencanaan pembangunan bidang perekonomian, Sumber Daya Alam, infrastruktur dan kewilayahan antar daerah kabupaten dan antar daerah dengan swasta, dalam dan luar negeri;
- l) Melaksanakan penjaringan aspirasi masyarakat melalui forum musyawarah pembangunan dan forum organisasi perangkat kerja daerah bidang perekonomian, Sumber Daya Alam, infrastruktur dan kewilayahan;
- m) Menetapkan petunjuk teknis monitoring dan evaluasi pembangunan daerah di bidang perekonomian, Sumber Daya Alam, infrastruktur dan kewilayahan;
- n) Melaksanakan fungsi lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi Bidang Ekonomi, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan di bantu oleh 3 (tiga) Sub-Substansial, yaitu:

- 1) Sub-Substansi Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam
- 2) Sub-Substansi Keciptakaryaan dan Kewilayahan

#### 6. Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah

Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan Penelitian dan Pengembangan di bidang penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah daerah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai fungsi :

- a) Menetapkan petunjuk pelaksanaan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah di bidang Penelitian dan Pengembangan;
- b) Merumuskan kebijakan pelaksanaan standar pelayanan minimal di bidang Penelitian dan Pengembangan;
- c) Menyusun kebijakan teknis penelitian dan pengembangan Pemerintah Kabupaten;
- d) Menyusun perencanaan program dan anggaran penelitian dan pengembangan Pemerintah Kabupaten;
- e) Memfasilitasi dan melaksanakan Inovasi Daerah di bidang Penelitian dan Pengembangan;
- f) Melaksanakan sinkronisasi penyusunaan dokumen rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek pada organisasi perangkat daerah bidang Penelitian dan Pengembangan;
- g) Melaksanakan evaluasi dokumen rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek pada organisasi perangkat daerah bidang Penelitian dan Pengembangan;
- h) Melaksanakan pengendalian dan evaluasi pencapaian kinerja pembangunan daerah jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek bidang Penelitian dan Pengembangan;
- i) Mengoordinasikan evaluasi pencapaian kinerja pembangunan daerah jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek pada organisasi perangkat daerah bidang Penelitian dan Pengembangan;
- j) Melaksanakan konsultasi dan koordinasi dokumen rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek bidang Penelitian dan Pengembangan dengan instansi pemerintah yang lebih tinggi;
- k) Melaksanakan kerjasama perencanaan pembangunan bidang Penelitian dan Pengembangan antar daerah kabupaten dan antar daerah dengan swasta, dalam dan luar negeri;
- l) Melaksanakan penjaringan aspirasi masyarakat melalui forum musyawarah pembangunan dan forum organisasi perangkat kerja daerah bidang Penelitian dan Pengembangan;
- m) Menetapkan petunjuk teknis monitoring dan evaluasi pembangunan daerah di bidang Penelitian dan Pengembangan;

n) Melaksanakan fungsi lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugasnya, bidang Penelitian dan pengembangan membawahi 3 (tiga) Sub-Substansi bidang yaitu :

- 1) Sub-Substansi Sosial dan Pemerintahan
- 2) Sub-Substansi Ekonomi dan Pembangunan
- 3) Sub-Substansi Inovasi dan Teknologi

#### 1.2.3 Sumber Daya Aparatur

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Bappelitbangda didukung oleh 51 orang pegawai dengan rincian tabel berikut:

Tabel 1.1 Kondisi Kepegawaian Bappelitbangda Tahun 2023

No.	Uraian Jabatan	Eselon II	Eselon III	Eselon IV	Fungsional Tertentu	Fungsional Umum	PTT/THL	Jumlah
1.	Kepala BAPPELITBANGDA		-	-	-	-	-	0
2.	Sekretariat		1	1	2	5	14	23
3.	Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan		1		4	2	1	8
4.	Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		1		2	1	2	6
5.	Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayah		1		3	2	3	9
6.	Bidang Penelitian dan Pengembangan		1		2	1		4
<b>Total</b>		<b>0</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>15</b>	<b>9</b>	<b>20</b>	<b>50</b>

Sumber : Bappelitbangda

Pada tahun 2023, terjadi beberapa pergantian pimpinan pada eselon III dan mutasi eselon II diakhir tahun 2023. Sehingga di akhir tahun 2023, jumlah ASN yang berada di lingkungan Bappelitbangda Kabupaten Pasaman Barat yaitu sebanyak 50 orang. Jika dilihat dari jenjang pendidikan yang ditamatkan, rata-rata pegawai memiliki ijazah Strata-1 (sarjana).

Tabel 1.2 Komposisi Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Uraian Jabatan	Strata III	Strata II	Strata I	Sarjana Muda/D3	SLTA	SLTP	Jumlah
1.	Kepala BAPPELITBANGDA							1
2.	Sekretariat	1	1	5		1		8
3.	Bidang Perencanaan, Pengendalian dan		2	5				7

No.	Uraian Jabatan	Strata III	Strata II	Strata I	Sarjana Muda/D3	SLTA	SLTP	Jumlah
	Evaluasi Pembangunan							
4.	Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		2	2				4
5.	Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahannya			5		1		6
6.	Bidang Penelitian dan Pengembangan		3	1				4
7.	PTT/THL			9	1	8	2	20
<b>Total</b>		<b>1</b>	<b>9</b>	<b>28</b>	<b>1</b>	<b>10</b>	<b>2</b>	<b>50</b>

Sumber : Bappelitbangda

Sementara jika dilihat dari komposisi pegawai berdasarkan golongan, sebagian besar pegawai dengan status PNS yang bekerja pada Bappelitbangda dengan ijazah setingkat Strata I (sarjana) merupakan pegawai pada golongan III. Adapun rincian komposisi pegawai Bappelitbangda berdasarkan golongan dapat dilihat pada Tabel 1.3.

Tabel 1.3 Komposisi Pegawai berdasarkan Golongan

No.	Uraian Jabatan	Gol I	Gol II	Gol III	Gol IV	Jumlah
1.	Kepala BAPPELITBANGDA				1	1
2.	Sekretariat		1	6	1	8
3.	Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan			6	1	7
4.	Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia			4	0	5
5.	Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahannya		1	4	1	6
6.	Bidang Penelitian dan Pengembangan			3	1	4
7.	PTT/THL					
<b>Total</b>		<b>2</b>	<b>23</b>	<b>6</b>	<b>30</b>	

Sumber : Bappelitbangda

Adapun jika dilihat berdasarkan gender, proporsi pegawai berdasarkan jenis kelamin sudah dianggap berimbang antara laki-laki dan perempuan. Secara rinci proporsi antara pegawai berjenis kelamin laki-laki dan perempuan tersaji pada Tabel 1.4.

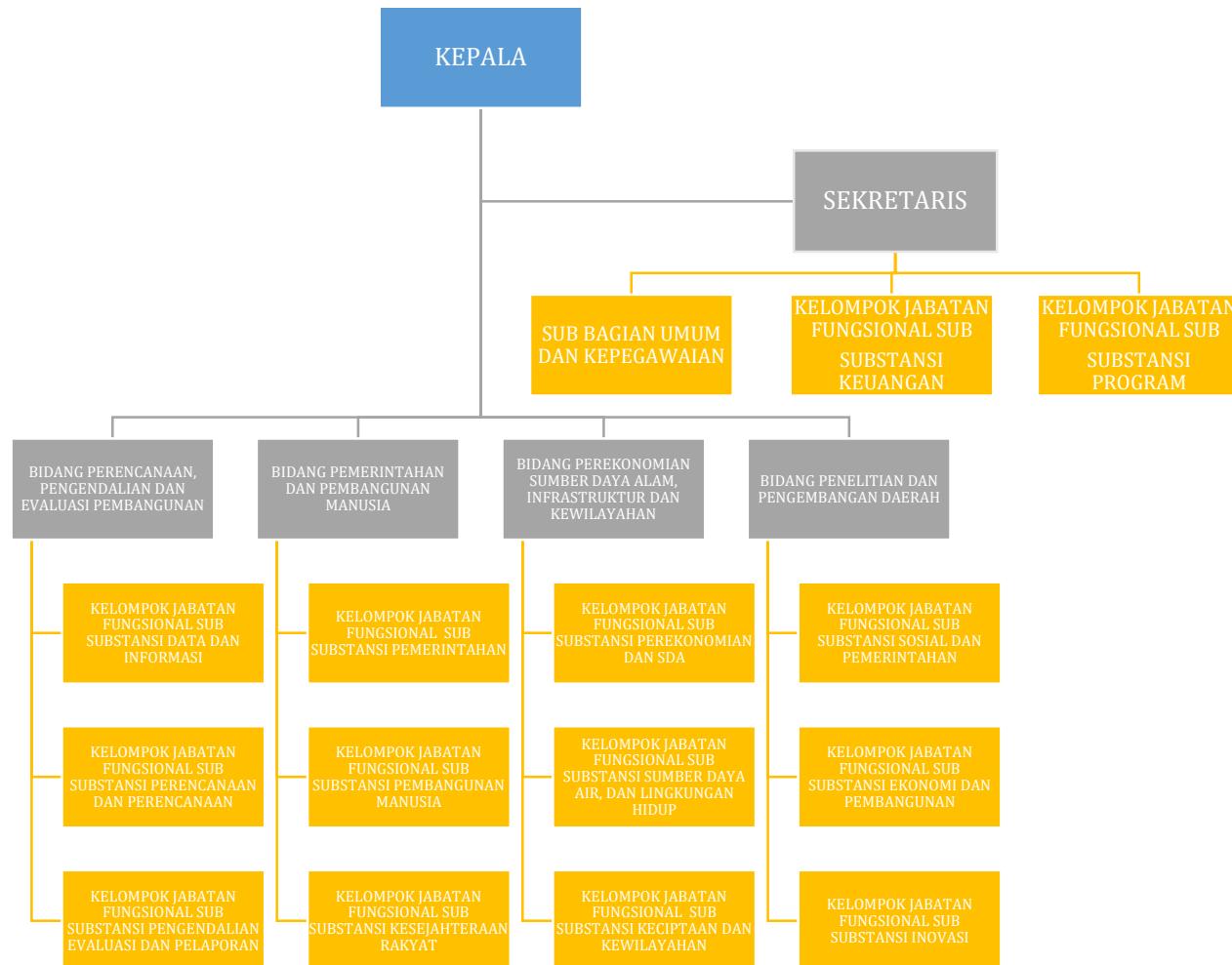
Tabel 1.4 Komposisi Pegawai berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Uraian Jabatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Kepala BAPPELITBANGDA		1	1
2.	Sekretariat	2	6	8
3.	Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan	4	2	6

No.	Uraian Jabatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
4.	Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	4	1	5
5.	Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahannya	3	3	6
6.	Bidang Penelitian dan Pengembangan	1	3	4
7.	PTT/THL	11	9	20
	<b>Total</b>	<b>24</b>	<b>27</b>	<b>50</b>

Sumber : Bappelitbangda

**Gambar 1.4 STRUKTUR ORGANISASI BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH (BAPPELITBANGDA) KABUPATEN PASAMAN BARAT**



Sumber : Bappelitbangda

#### 1.2.4 Aspek Strategis dan Isu Strategis

Isu suatu wilayah selalu berkaitan dengan potensi dan persoalan wilayah itu sendiri. Oleh karena itu, diperlukan arahan pengelolaan setiap isu strategis yang sudah diidentifikasi. Strategi dirumuskan berdasarkan hasil analisis gambaran pelayanan PD, hasil perumusan isu-isu strategis, tujuan dan sasaran jangka menengah PD. Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Isu strategis PD dirumuskan berdasarkan kajian terhadap permasalahan pokok daerah yang menjadi tugas dan fungsi PD pengampu.

Perumusan isu-isu strategis Bappelitbangda Kabupaten Pasaman Barat untuk lima tahun mendatang didasarkan pada beberapa aspek, yaitu:

- 1) Permasalahan penyelenggaraan urusan yang menjadi tugas dan fungsi Bappelitbangda Kabupaten Pasaman Barat;
- 2) Gambaran pelayanan Bappelitbangda Kabupaten Pasaman Barat;
- 3) Hasil telaah terhadap sasaran jangka menengah dalam Renstra Kementerian PPN/Bappenas dan Provinsi;
- 4) Hasil telaah RTRW;
- 5) Hasil telaah KLHS;
- 6) RPJP dan RPJMD.

Mengacu pada hasil evaluasi pelaksanaan Renstra sebelumnya, prediksi permasalahan dan tantangan lima tahun ke depan, pertimbangan tugas dan fungsi pelayanan Bappelitbangda serta memperhatikan aspek-aspek penting lainnya di bidang perencanaan, maka dirumuskan isu-isu strategis yang akan dihadapi oleh Bappelitbangda selama lima tahun ke depan sebagaimana disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.5 Isu Strategis Bappelitbangda Kabupaten Pasaman Barat  
Tahun 2021-2026

<b>Tugas dan Fungsi</b>	<b>Permasalahan</b>	<b>Isu Strategis</b>
1. Perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan pembangunan daerah</li> <li>2. Belum terwujudnya konsistensi antar dokumen perencanaan daerah</li> <li>3. Belum terwujudnya konsistensi pelaksanaan pembangunan dengan dokumen perencanaan tata ruang daerah</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang terukur, konsisten, selaras, tepat waktu dan sesuai dengan dokumen perencanaan pembangunan.</li> </ol>
2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang urusan penunjang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum tersedianya data pendukung perencanaan yang memadai</li> <li>2. Belum terfasilitasinya kegiatan penelitian dan pengembangan</li> <li>3. Belum optimalnya pemanfaatan dokumen hasil penelitian dan pengembangan untuk menunjang perencanaan daerah</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedianya data pendukung perencanaan pembangunan yang memadai melalui penyediaan dokumen statistik dan penelitian yang berkualitas</li> <li>2. Fasilitasi dan penyediaan sarana sosialisasi kegiatan penelitian dan pengembangan daerah</li> <li>3. Mendorong pengembangan inovasi dalam pelaksanaan</li> </ol>

<b>Tugas dan Fungsi</b>	<b>Permasalahan</b>	<b>Isu Strategis</b>
	4. Rendahnya inovasi daerah dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan, pelayanan publik dan inovasi lainnya	tata kelola pemerintahan, pelayanan publik dan inovasi lainnya
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah	2. Masih kurangnya SDM yang memiliki kompetensi perencanaan 3. Pencapaian nilai akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah belum sesuai target	1. Peningkatan kompetensi dan kemampuan SDM perencanaan daerah melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan 2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja yang ditandai dengan peningkatan nilai SAKIP dan Level Maturitas SPIP Pemerintah Daerah
4. Evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah	1. Belum optimalnya pencapaian target kinerja RPJMD dan RKPD 2. Belum efektifnya pengendalian dan evaluasi kebijakan pembangunan daerah 3. Belum tersedianya mekanisme monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan yang tepat dan akurat	3. Peningkatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah melalui penerapan teknologi informasi yang tepat guna

Sumber : Perubahan Renstra Bappelitbangda Tahun 2021-2026

### **1.3 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja**

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Bappelitbangda Kabupaten Pasaman Barat tahun 2023 dimaksudkan sebagai pertanggungjawaban terhadap keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran dengan strategi berupa kebijakan dan program yang terdiri atas kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBD Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2023. Laporan Kinerja ini ditujukan kepada Bupati Pasaman Barat dan sebagai bahan dukungan untuk penyusunan LKj Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2022 yang diinput kedalam website Kementerian PAN-RB untuk proses evaluasi SAKIP Pemerintah Daerah.

Tujuan penyusunan LKj Bappelitbangda Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2023 secara umum adalah sebagai perwujudan akuntabilitas instansi kepada pihak-pihak yang memberi mandat, dan terciptanya sistem pelaporan akuntabilitas yang dapat meningkatkan kepercayaan terhadap pemerintah, serta meningkatkan kinerja instansi pemerintah dalam menjalankan misi. Tujuan akhir dari penyusunan LKj yaitu diharapkan dapat terciptanya tata pemerintahan yang baik (*good governance*).

### **1.4 Sistematika Penulisan**

Berdasarkan reviu LKj Bappelitbangda tahun 2022 yang dilakukan inspektorat, penyusunan dan sistematika penulisan LKj berpedoman pada Permenpan-rb Nomor 53 tahun 2014. Adapun penyajian LKj Bappelitbangda tahun 2023 adalah sebagai berikut:

**RINGKASAN EKSEKUTIF****DAFTAR ISI****BAB I PENDAHULUAN**

Tugas pokok dan fungsi, struktur organisasi, dan maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja (LKj)

**BAB II RENCANA STRATEGIS**

Menjelaskan visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi, kebijakan dan rencana kinerja

**BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

Menyajikan indikator kinerja, metodologi yang digunakan dalam pengukuran kinerja, analisis pencapaian sasaran strategis, dan akuntabilitas keuangan

**BAB IV PENUTUP**

Menyajikan kesimpulan keberhasilan atau kegagalan serta strategi pemecahan masalah untuk perbaikan pada masa yang akan datang

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **2.1 Perencanaan Kinerja Jangka Menengah**

Pada tahun 2023 terdapat perubahan Renstra Bappelitbangda Tahun 2021-2026. Perubahan didasari pada adanya perubahan RPKMD Kabupaten Pasaman Barat tahun 2021-2026 yang disebabkan oleh adanya ketidaksesuaian asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program/kegiatan berkenaan sehingga mengakibatkan adanya perubahan pagu kegiatan/subkegiatan, perubahan lokasi dan kelompok sasaran. Perubahan ini sekaligus dalam rangka percepatan pelaksanaan pembangunan jangka menengah periode 2021-2026.

Tahun 2023 merupakan tahun ketiga dalam pembangunan jangka menengah Kabupaten Pasaman Barat. Visi yang diusung Kepala Daerah adalah “mewujudkan Pasaman Barat yang bermartabat, agamais, maju dan sejahtera”. Misi yang ingin dicapai, yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang professional dan inovatif; membangun sumber daya manusia yang beriman dan bertaqwa, berbudaya dan berdaya saing; mewujudkan perekonomian yang tangguh, berdaya saing, dan inklusif. Pada Perubahan Renstra Bappelitbangda tahun 2021-2026, tugas pokok dan fungsi Bappelitbangda masih mendukung misi pertama yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang professional dan inovatif dengan tujuan penerapan tata kelola pemerintahan professional, akuntabel dan inovatif.

#### **2.2 Tujuan dan Sasaran**

Pada Perubahan Renstra Bappelitbangda tahun 2021-2026, untuk mendukung pencapaian visi misi Kepala Daerah dan dalam rangka percepatan pelaksanaan pembangunan, maka ditetapkan kembali tiga tujuan Bappelitbangda sesuai tupoksinya yang dijabarkan pada tabel berikut:

Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Bappelitbangda mengacu pada Misi Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026

<b>Tujuan</b>	<b>Indikator Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Indikator Sasaran</b>	<b>Target Kinerja Pada Tahun</b>					
				<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
1. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah	Indeks Kualitas Perencanaan			75%	80%	81%	82%	83%	85%
		1. Meningkatnya kinerja perencanaan pembangunan daerah	1. Persentase tingkat keselarasan dokumen perencanaan jangka menengah dan tahunan daerah dengan dokumen perencanaan Perangkat Daerah	72%	80%	85%	90%	95%	100%
			2. Persentase capaian IKU daerah	88,14 %	100%	100%	100%	100%	100%
			3. Persentase pencapaian nilai komponen perencanaan pada penilaian SAKIP	75,53 %	80%	81%	82%	83%	85%

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Pada Tahun					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
2. Meningkatkan implementasi kelitbangda dan inovasi daerah	Indeks Inovasi Daerah			36,32	45	50	55	60	65
		2. Meningkatnya peran kelitbangda dan inovasi dalam pembangunan	4. Persentase implementasi kelitbangda 5. Kategori capaian <i>Innovation Government Award</i> (IGA)	80% Inovatif	85% Inovatif	90% Inovatif	95% Inovatif	100% Inovatif	100% Sangat Inovatif
3. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Bappelitbangda	Nilai SAKIP Bappelitbangda			B	B	B	BB	BB	BB
	Level Maturitas SPIP Bappelitbangda			3	3	3	3	3	3
		3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Bappelitbangda	6. Nilai SAKIP Bappelitbangda 7. Level Maturitas SPIP Bappelitbangda	B 3	B 3	B 3	BB 3	BB 3	BB 3
			8. Persentase penurunan jumlah temuan BPK dan/atau Inspektorat 9. Indeks Kepuasan Masyarakat	50% N/A	50% N/A	75% 80	75% 82	80% 84	80% 85

Sumber : Perubahan Renstra Bappelitbangda Tahun 2021-2026

### 2.3 Realisasi Kinerja Indikator Utama (IKU)

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan suatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkat kinerja. Indikator Kinerja menjadi patokan penilaian keberhasilan atau kegagalan penyelenggaraan pemerintahan dalam mencapai visi dan misi organisasi.

Adapun beberapa jenis indikator kinerja yang sering digunakan dalam pelaksanaan pengukuran suatu organisasi:

1. **Indikator Masukan (Input)** adalah menunjukkan segala sesuatu yang diperlukan dalam rangka menghasilkan keluaran (output) misalnya sumber daya manusia, dana, waktu, material, teknologi dan lain-lain.
2. **Indikator Proses** adalah segala besaran yang menunjukkan upaya yang harus dilakukan dalam rangka mengolah masukan menjadi keluaran, indikator proses menggambarkan perkembangan atau aktifitas yang terjadi atau dilakukan selama pelaksanaan kegiatan berlangsung, khususnya dalam proses mengolah masukan menjadi keluaran.
3. **Indikator Keluaran (Output)** adalah sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik dan non fisik.
4. **Indikator Hasil (Outcome)** adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran pada tingkat pencapaian kinerja yang diharapkan terwujud.

5. **Indikator Manfaat (Benefit)** adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan.
6. **Indikator Dampak (Impact)** adalah indikator yang menggambarkan pengaruh dari pencapaian program terhadap masyarakat secara luas. Indikator ini diukur setelah berlalunya kegiatan atau program dalam jangka waktu tertentu.

#### 2.4 Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023

Perjanjian Kinerja merupakan pernyataan komitmen pimpinan untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Pada dasarnya perjanjian kinerja tahun 2023 merupakan perjanjian kerja Bappelitbangda Kabupaten Pasaman Barat selama tahun 2023 dengan Bupati Pasaman Barat untuk melaksanakan tugas dan fungsinya. Salah satu tujuan Perjanjian Kinerja adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara pemberi dengan penerima amanah. Perjanjian Kinerja juga digunakan sebagai dasar penilaian keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi serta sebagai evaluasi kinerja aparatur. Perjanjian Kinerja Eselon II Bappelitbangda Kabupaten Pasaman Barat disajikan pada tabel 2.2 berikut:

Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Bappelitbangda Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja (outcome/hasil)	Target
1.	Meningkatnya kinerja perencanaan pembangunan daerah	1. Persentase tingkat keselarasan dokumen perencanaan jangka menengah dan tahunan daerah dengan dokumen perencanaan perangkat daerah 2. Persentase capaian IKU daerah 3. Persentase pencapaian nilai komponen perencanaan pada penilaian SAKIP	1. 85% 2. 100% 3. 81%
2.	Meningkatnya peran kelitbangan dan inovasi dalam pembangunan	1. Persentase implementasi kelitbangan 2. Kategori capaian <i>Innovation Government Award</i> (IGA)	4. 90% 5. Inovatif
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Bappelitbangda	6. Nilai SAKIP Bappelitbangda 7. Level Maturitas SPIP Bappelitbangda 8. Persentase penurunan	3. BB 4. Level 3 5. 75%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja (outcome/hasil)	Target
		jumlah temuan BPK dan/atau Inspektorat 9. Indeks Kepuasan Masyarakat	6. 80

Sumber : Perjanjian Kinerja Bappelitbangda Tahun 2023

Untuk mencapai sasaran di atas, Bappelitbangda menganggarkan Rp6.639.199.602,00 yang digunakan untuk melaksanakan 4 program, 16 kegiatan dan 42 subkegiatan. Rincian alokasi anggaran Bappelitbangda tahun 2023 disajikan pada tabel 2.3 berikut ini:

Tabel 2.3 Alokasi Anggaran berdasarkan Program dan Kegiatan Bappelitbangda Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2023

No.	Program	Anggaran
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Rp. 4.814.260.905,-
2.	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Rp. 620.787.300,-
3.	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp. 639.180.650,-
4.	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Rp. 225.960.700,-
No.	Kegiatan	
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 45.719.900,-
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 3.705.690.693,-
3.	Adminstrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp. 44.325.000,-
4.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp. 112.579.250,-
5.	Adminstrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 347.755.912,-
6.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 131.965.400,-
7.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 172.417.250,-
8.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 253.807.500,-
9.	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Rp. 459.584.400,-
10.	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp. 78.006.000,-
11.	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp. 83.196.900,-
12.	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Rp. 348.683.950,-

13.	Koordinasi Perencanaan Bidang Prekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Rp.	56.260.100,-
14.	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahana	Rp.	234.236.600,-
15.	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Rp.	98.960.500,-
16.	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Rp.	127.000.200,-

Sumber : Perjanjian Kinerja Bappelitbangda Tahun 2023

### **BAB III** **AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **3.1 Capaian Kinerja Organisasi**

Capaian kinerja organisasi merupakan pertanggungjawaban atas keberhasilan dan/atau kegagalan dalam pelaksanaan tujuan dan sasaran organisasi. Untuk menilai keberhasilan dan/atau kegagalan dilakukan evaluasi kinerja berupa pengukuran capaian kinerja sesuai indikator kinerja dan metodologi pengukuran yang telah ditetapkan. Pengukuran capaian kinerja yang diperoleh berdasarkan perbandingan antara target dengan realisasi yang berhasil dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) tahun berjalan. Capaian indikator kinerja yang diukur adalah capaian realisasi fisik (output/keluaran) dan keuangan. Capaian kinerja Bappelitbangda Kabupaten Pasaman Barat tahun 2023 didapatkan dengan membandingkan antara realisasi yang dicapai dengan target sesuai dengan indikator kinerja yang ditetapkan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) Bappelitbangda Kabupaten Pasaman Barat tahun 2023 dalam Perjanjian Kinerja (PK) antara Kepala Bappelitbangda dengan Bupati Pasaman Barat. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik dan sebaliknya jika semakin rendah realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin buruk. Perhitungan capaian kinerja didapat dengan menggunakan rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = (\text{Realisasi}/\text{Target}) \times 100\%$$

Untuk menilai ketercapaian kinerja digunakan klasifikasi penilaian berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Interval predikat capaian kinerja Bappelitbangda disajikan pada tabel 3.1 berikut ini :

Tabel 3.1. Skala Penilaian Capaian Kinerja

No.	Klasifikasi Penilaian	Predikat
1	$91\% \leq 100\%$	Sangat Tinggi
2	$76\% \leq 90\%$	Tinggi
3	$66\% \leq 75\%$	Sedang
4	$51\% \leq 65\%$	Rendah
5	$\leq 50\%$	Sangat Rendah

Sumber : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

#### **3.2 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023**

Berpedoman pada Renstra Perubahan Bappelitbangda tahun 2023, terdapat 3 sasaran Bappelitbangda yang dinilai melalui 9 indikator sasaran. Secara umum, indikator sasaran Bappelitbangda tahun 2023 mencapai predikat *Sangat Tinggi*.

Tabel 3.2 Penilaian Capaian Kinerja Bappelitbangda Tahun 2023

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target RKPD Tahun 2023	Capaian Realisasi Tahun 2023	Capaian (%)	Tercapai (sudah ✓/ belum x)
1	Meningkatnya kinerja perencanaan pembangunan daerah	Persentase tingkat keselarasan dokumen perencanaan jangka menengah dan tahunan daerah dengan dokumen perencanaan Perangkat Daerah	85%	88,09%	103,63	✓
		Persentase capaian IKU daerah	100%	48,15%	48,15%	X
		Persentase pencapaian nilai komponen perencanaan pada penilaian SAKIP	81%	78%	96,29	X
2	Meningkatnya peran kelitbangan dan inovasi dalam pembangunan	Persentase implementasi kelitbangan	90%	100%	111,11	✓
		Kategori capaian <i>Innovation Government Award (IGA)</i>	Inovatif	Inovatif	100	✓

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target RKPd Tahun 2023	Capaian Realisasi Tahun 2023	Capaian (%)	Tercapai (sudah ✓/ belum x)
3	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Bappelitbangda	Nilai SAKIP Bappelitbangda	B	BB	100	✓
		Level Maturitas SPIP Bappelitbangda	3	3	100	✓
		Persentase penurunan jumlah temuan BPK atas laporan keuangan Bappelitbangda	75%	75%	100	✓
		Indeks Kepuasan Masyarakat	80	81,94	102,42	✓

Sumber : data diolah, Bappelitbangda 2024

1. Sasaran 1 : Meningkatnya kinerja perencanaan pembangunan daerah

Pencapaian target kinerja sasaran strategis 1 diukur dengan 3 indikator sasaran. Indikator sasaran pertama, dihitung melalui peningkatan kualitas dokumen perencanaan daerah melalui persentase tingkat keselarasan dokumen perencanaan jangka menengah dan tahunan daerah dengan dokumen perencanaan perangkat daerah berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kesesuaian Dokumen Perencanaan pada Organisasi Perangkat Daerah. Persentase dihitung dengan cara membagi jumlah PD dengan dokumen perencanaan bernilai minimal baik dengan jumlah PD sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah OPD dengan dokumen perencanaan baik}}{\text{Jumlah OPD}} \times 100\%$$

Dari 42 perangkat daerah, sebanyak 5 PD yang mendapat nilai Sangat Baik, sebanyak 32 PD yang mendapat nilai Baik, 4 PD mendapat nilai Buruk dan 1 PD yang mendapat nilai Sangat Buruk. Dinas Tenaga Kerja adalah PD yang mendapat skor paling tinggi sebesar 91,76 dan Satpol PP adalah PD yang mendapat skor paling rendah sebesar 37,70. Dari data di atas diperoleh hasil persentase tingkat keselarasan dokumen perencanaan jangka menengah dan tahunan daerah dengan

dokumen perencanaan Perangkat Daerah sebesar 88,09%. Indikator sasaran ini berhasil dicapai melebihi target dengan predikat *Sangat Tinggi*.

Persentase capaian IKU Daerah tahun 2023 adalah sebesar 48,15%. Tidak tercapainya realisasi pada capaian kinerja ini disebabkan oleh perubahan perhitungan (definisi operasional) dari IKU dimaksud, dimana berdasarkan Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor 100.3.3.2/880/BUP-PASBAR/2023 yang menjadi dasar perhitungan Capaian IKU Daerah, sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah target kinerja IKU yang tercapai} \times 100\%}{\text{Jumlah target kinerja pada IKU daerah}}$$

Pada tahun 2023, IKU yang mencapai target 100% sebanyak 13 indikator kinerja sementara yang tidak mencapai target 100% sebanyak 14 indikator dari 27 indikator kinerja utama. Capaian realisasi indikator sasaran ini mendapat predikat *Sangat Rendah*.

Berdasarkan hasil evaluasi AKIP Tahun 2023 yang dilakukan Kemenpan-rb Nomor B/196/AA.05/2023 tanggal 27 November 2023, pencapaian nilai komponen perencanaan pada penilaian SAKIP mendapat nilai 23,32. Perhitungan capaian indikator sasaran ini dihitung sebagai berikut:

$$\frac{\text{Nilai komponen perencanaan hasil evaluasi SAKIP Pemda oleh KemenPANRB} \times 100\%}{\text{Nilai Komponen Tertinggi}}$$

Dari hasil perhitungan, persentase pencapaian nilai komponen perencanaan pada penilaian SAKIP sebesar 77,73% dari target tahun 2023 sebesar 81%. Capaian indikator sasaran ini mendapat predikat *Sangat Tinggi*. Meski mendapat predikat *Sangat Tinggi*, capaian indikator sasaran ini tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Masih adanya indikator kinerja yang belum memenuhi kriteria spesifik, terukur, relevan dan cukup dalam mendukung sasaran Pemda “Masyarakat yang Agamis dan Berbudaya”, terdapat ketidak selaras indikator PD atas Renstra, PK, dan indikator utama sehingga tidak tergambar kinerja yang ingin dicapai, sebagian besar PD telah menyusun dokumen penjenjangan kinerja namun belum memiliki kualitas yang baik sesuai *Critical Success Factor (CSF)*.

2. Sasaran 2 : Meningkatnya peran kelitbangan dan inovasi dalam pembangunan

Ada dua indikator sasaran pada sasaran strategis ini, persentase implementasi kelitbangan dan kategori capaian IGA. Persentase implementasi kelitbangan dihitung dengan cara :

$$\frac{\text{Jumlah kajian kelitbangan yang ditindaklanjuti} \times 100\%}{\text{Jumlah kajian kelitbangan dalam Renja PD}}$$

Berdasarkan hasil perhitungan di atas, capaian persentase implementasi kelitbangan sebesar 100% dengan target sebesar 90%. Jumlah kajian kelitbangan yang dilaksanakan oleh PD terdapat 7 kajian dan ditindaklanjuti kajian tersebut oleh Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR, BPBD, Dinas Perkebunan, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura. Indikator sasaran ini mendapat predikat *Sangat Tinggi*.

Capaian kategori IGA tahun 2023 dikeluarkan oleh Kepmendagri tentang Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota tahun 2023. Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat mendapatkan skor 55,03 dengan kategori "Kabupaten Inovatif" pada ajang Innovation Government Award (IGA). Ditingkat Provinsi Indeks Inovasi Daerah (IID) Kabupaten Pasaman Barat memperoleh peringkat ke-3 Kabupaten Inovatif. setelah Kabupaten Dharmasraya dan Pesisir Selatan. Capaian indikator sasaran ini tercapai memenuhi target tahun 2023 dengan predikat *Sangat Tinggi*. Capaian ini didukung oleh adanya peningkatan antusiasme PD dalam melakukan inovasi yang terlihat pada adanya peningkatan jumlah inovasi yang didaftarkan pada ajang IGA.

### 3. Sasaran 3 : Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Bappelitbangda

Ada empat indikator sasaran pada sasaran strategis ini, yaitu nilai SAKIP Bappelitbangda, Level Maturitas SPIP Bappelitbangda, persentase penurunan jumlah temuan BPK atas laporan keuangan Bappelitbangda dan Indeks Kepuasan Masyarakat. Nilai SAKIP Bappelitbangda dinilai berdasarkan LHE SAKIP OPD oleh Inspektorat. Berdasarkan LHE AKIP Bappelitbangda tahun 2023 Nomor 700.1.2.1/13/Inspekt-LHE/IX/2023, nilai SAKIP Bappelitbangda sebesar 72,95 dengan tingkat akuntabilitas kinerja BB kategori Sangat Baik, artinya akuntabilitas terlihat melalui efisiensi pengguna anggaran dalam mencapai kinerja sangat baik, sistem manajemen kinerja andal. Indikator sasaran ini mendapat predikat *Sangat Tinggi*.

Level Maturitas SPIP dinilai oleh BPKP/Inspektorat. Pada tahun 2023 tidak dilakukan penilaian oleh Inspektorat sehingga nilai level maturitas SPIP masih berada pada level 3. Berdasarkan Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Kabupaten Pasaman Barat tanggal 29 Desember 2022 dimana Level Maturitas SPIP Bappelitbangda memperoleh level 3. Sementara Penetapan Hasil Evaluasi Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2023, Pemerintah Pasaman Barat memperoleh skor 3,132 dengan level 3. Capaian ini mendapatkan predikat *Sangat Tinggi*.

Persentase penurunan jumlah temuan BPK atas laporan keuangan Bappelitbangda diperoleh melalui laporan hasil pemeriksaan (LHP) Instansi Pemerintah yang diterbitkan oleh Inspektorat dan BPK. Berdasarkan hasil perhitungan, persentase penurunan jumlah temuan BPK tercapai sebesar 100% dengan predikat *Sangat Tinggi*, yang artinya tidak ada temuan pada instansi Bappelitbangda pada tahun 2023. Tingginya integritas dan loyalitas pegawai dalam mematuhi administrasi keuangan menjadi pendorong tercapainya indikator sasaran ini.

Capaian indikator sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat baru ditetapkan pada tahun 2023 berdasarkan Renstra Perubahan Tahun 2021-2026. Capaian ini diperoleh melalui hasil perhitungan survey. Berdasarkan hasil survey IKM Bappelitbangda memperoleh nilai 81,94% sementara target pada tahun 2023 sebesar 80%. Capaian ini berhasil mendapat predikat *Sangat Tinggi*.

### 3.3. Analisis Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Lalu

Pada tahun 2022, Bappelitbangda memiliki 6 sasaran strategis dan 8 indikator sasaran. Namun pada tahun 2023 seiring dengan adanya perbaikan kualitas dokumen perencanaan lengkap dengan perbaikan indikator dan definisi operasional yang telah mempedomani Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, maka di tahun 2023 Bappelitbangda memiliki 3 sasaran strategis dengan 9 indikator sasaran. Penambahan indikator sasaran yaitu adanya indikator Indeks Kepuasan Masyarakat sebagai salah satu dukungan misi Kepala Daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang professional dan inovatif. Pada tahun 2022, ada dua indikator sasaran yang tidak mencapai target yaitu indikator persentase tingkat keselarasan dokumen perencanaan jangka menengah dan tahunan daerah dengan dokumen perencanaan Perangkat Daerah dan persentase pencapaian nilai komponen perencanaan pada penilaian SAKIP. Di tahun 2023, persentase pencapaian nilai komponen perencanaan pada penilaian SAKIP juga tidak mencapai target yang telah ditetapkan, diperlukan perbaikan maksimal dari dimensi perencanaan dan pengendalian yang menjadi indikator penilaian SAKIP. Terdapat dua indikator sasaran yang belum dilakukan perhitungan. Namun secara umum, capaian sasaran kinerja Bappelitbangda lebih baik dari tahun sebelumnya dan mampu mencapai target yang terus naik setiap tahun. Peningkatan terjadi secara umum disebabkan adanya peningkatan upaya perbaikan dan keseriusan dalam meningkatkan kualitas dokumen perencanaan melalui reviu berlapis mulai dari PIC Bappelitbangda, Inspektorat, BKAD hingga Kemenkumham; adanya peningkatan

kepatuhan dan integritas atas penggunaan anggaran; adanya komitmen kuat dari seluruh unsur Bappelitbangda dalam keberhasilan pencapaian sasaran, program/kegiatan/subkegiatan; penggunaan aplikasi perencanaan lebih terarah dan tersistematis.

Tabel 3.3 Capaian Sasaran Tahun ini dengan Tahun Lalu

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target RKPD Tahun 2021	Capaian Realisasi Tahun 2021	Target RKPD Tahun 2022	Capaian Realisasi Tahun 2022	Target RKPD Tahun 2023	Capaian Realisasi Tahun 2023
1	Meningkatnya kinerja perencanaan pembangunan daerah	Persentase tingkat keselarasan dokumen perencanaan jangka menengah dan tahunan daerah dengan dokumen perencanaan Perangkat Daerah	72%	75,36%	80%	74,42%	85%	88,09%
		Persentase capaian IKU daerah	88,14%	40,74%	100%	44,44%	100%	48,15%
		Persentase pencapaian nilai komponen perencanaan pada penilaian SAKIP	75,53%	76,97%	80%	77,50%	81%	78%

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target RKPD Tahun 2021	Capaian Realisasi Tahun 2021	Target RKPD Tahun 2022	Capaian Realisasi Tahun 2022	Target RKPD Tahun 2023	Capaian Realisasi Tahun 2023
2	Meningkatnya peran kelitbangda dan inovasi dalam pembangunan	Persentase implementasi kelitbangda	80%	-	85%	100%	90%	100%
		Kategori capaian <i>Innovation Government Award</i> (IGA)	Sangat Inovatif	Inovatif	Inovatif	Inovatif	Inovatif	Inovatif
3	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Bappelitbangda	Nilai SAKIP Bappelitbangda	B	AA	B	BB	B	BB

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target RKPd Tahun 2021	Capaian Realisasi Tahun 2021	Target RKPd Tahun 2022	Capaian Realisasi Tahun 2022	Target RKPd Tahun 2023	Capaian Realisasi Tahun 2023
		Level Maturitas SPIP Bappelitbangda	3	3	3	3	3	3
		Persentase penurunan jumlah temuan BPK atas laporan keuangan Bappelitbangda	50%	50%	50%	50%	75%	75%
		Indeks Kepuasan Masyarakat	NA	NA	NA	NA	80	81,94

Sumber : data diolah, Bappelitbangda 2024

### 3.4. Analisis Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Target Akhir Renstra Bappelitbangda

Pada Perubahan Renstra Bappelitbangda tahun 2021-2026 telah ditetapkan target yang harus dicapai dari tahun 2021 hingga tahun 2026. Tahun 2026 merupakan target terakhir yang ingin dicapai dalam periode lima tahun. Sedangkan tahun 2023 adalah tahun ketiga pelaksanaan Renstra Bappelitbangda. Pada tabel 3.4 di bawah ini, indikator sasaran persentase tingkat keselarasan dokumen perencanaan jangka menengah dan tahunan daerah dengan dokumen perencanaan Perangkat Daerah memiliki target 100% sementara pada tahun 2022 baru mencapai 74,42%. Indikator persentase capaian IKU daerah pada akhir tahun 2026 memiliki target 100%, di tahun 2022 baru tercapai 93,61%. Persentase pencapaian nilai komponen perencanaan pada penilaian SAKIP di akhir

Renstra memiliki target 85% namun baru terealisasi 78% di tahun 2023. Sasaran nomor 2 yaitu meningkatnya peran kelitbangan dan inovasi dalam pembangunan memiliki dua indikator sasaran yang juga belum tercapai targetnya di tahun 2026. Untuk sasaran nomor tiga yaitu Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Bappelitbangda memiliki empat indikator sasaran yang telah tercapai targetnya untuk tahun 2026, hanya satu indikator sasaran IKM yang belum mencapai targetnya untuk tahun 2026. Berikut disajikan perbandingan capaian tahun 2023 hingga akhir periode tahun 2026.

Tabel 3.4 Capaian Sasaran Tahun ini dengan Target Renstra Bappelitbangda

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target RKPD Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Target Renstra Tahun 2026
1	Meningkatnya kinerja perencanaan pembangunan daerah	Persentase tingkat keselarasan dokumen perencanaan jangka menengah dan tahunan daerah dengan dokumen perencanaan Perangkat Daerah	85%	88,09%	100%
		Persentase capaian IKU daerah	100%	48,15%	100%
		Persentase pencapaian nilai komponen perencanaan pada penilaian SAKIP	81%	78%	85%
2	Meningkatnya peran kelitbangda dan inovasi dalam pembangunan	Persentase implementasi kelitbangda	90%	100%	100%
		Kategori capaian <i>Innovation Government Award</i> (IGA)	Inovatif	Inovatif	Sangat Inovatif

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target RKPD Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Target Renstra Tahun 2026
3	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Bappelitbangda	Nilai SAKIP Bappelitbangda	B	BB	BB
		Level Maturitas SPIP Bappelitbangda	3	3	3
		Persentase penurunan jumlah temuan BPK atas laporan keuangan Bappelitbangda	75%	75%	80%
		Indeks Kepuasan Masyarakat	80	81,94	85

Sumber : data diolah, Bappelitbangda 2024

### 3.5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang telah Dilakukan

#### 1. Sasaran 1 : Meningkatnya Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah

- 1) Persentase tingkat keselarasan dokumen perencanaan jangka menengah dan tahunan daerah dengan dokumen perencanaan perangkat daerah  
Berdasarkan hasil penilaian terhadap dokumen perencanaan OPD, dapat diidentifikasi sebagai berikut:

Tabel 3.5 Perkembangan Capaian Persentase Tingkat Keselarasan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah Dan Tahunan Daerah Dengan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tahun 2021-2023

Ketercapaian Indikator	2021	2022	2023
PD dengan nilai dokumen perencanaan minimal baik	39 PD	32 PD	37 PD
PD dengan nilai dokumen perencanaan buruk	3 PD	10 PD	5 PD
Total PD	42 PD	42 PD	42 PD
<b>Tingkat Keselarasan Dokumen Perencanaan PD</b>	<b>92,86%</b>	<b>76,19%</b>	<b>88,09%</b>
Rerata Capaian (Nilai)	75,27%	73,21%	76,71%

Sumber : data diolah, Bappelitbangda 2024

Faktor yang menyebabkan keberhasilan pencapaian ini adalah:

- a) Tingginya komitmen seluruh pihak yang terlibat dalam perencanaan dalam meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah;
- b) Perbaikan metode pengukuran kinerja yang telah disesuaikan pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023;
- c) Semakin optimalnya kinerja Perencana dalam implementasi AKIP pada seluruh Perangkat Daerah;
- d) Sudah optimalnya penggunaan aplikasi SIPD-RI yang mengatur mekanisme/tahapan perencanaan pembangunan daerah sehingga dapat menjamin konsistensi dan keselarasan antar dokumen perencanaan hingga penganggaran.

Pada tahun 2023, Bappelitbangda berupaya untuk meningkatkan indikator sasaran persentase tingkat keselarasan dokumen perencanaan jangka menengah dan tahunan daerah dengan dokumen perencanaan Perangkat Daerah dengan rincian sebagai berikut:

- a) Meningkatkan koordinasi setiap PD dalam rangka meningkatkan kualitas dokumen perencanaan melalui pendampingan dan konsultasi yang dilakukan oleh PIC di Bappelitbangda untuk mereviu dokumen perencanaan PD;
- b) Meningkatkan koordinasi bersama Inspektorat dan BKAD pada proses reviu dokumen perencanaan PD serta melakukan harmonisasi bersama Kemenkumham untuk meningkatkan kualitas dokumen perencanaan pembangunan PD dan Kabupaten;
- c) Adanya perbaikan dalam pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan yang dilakukan per triwulan dan per semester untuk mempercepat pencapaian kinerja.

Meskipun Bappelitbangda sebagai koordinator perencanaan daerah telah melakukan berbagai upaya, namun masih terdapat beberapa kendala yang menjadi penghambat pencapaian, diantaranya:

- a) Rendahnya pemahaman PD terhadap peran strategis perencanaan sehingga mengakibatkan rendahnya peran bidang-bidang teknis PD dalam penyusunan dokumen perencanaan sehingga beban kinerja perencanaan tertumpu pada fungsional Perencana PD;
- b) Tingginya beban kerja JF Perencana menjadi sebab rendahnya fokus dan kualitas dalam menyusun dokumen perencanaan;
- c) Ketersediaan data yang dibutuhkan dalam proses penyusunan dokumen perencanaan belum memadai;
- d) Lemahnya analisis dalam mengevaluasi capaian kinerja untuk menentukan strategi/kebijakan yang akan diambil di tahun berikutnya;
- e) Belum adanya pemanfaatan teknologi aplikasi dalam pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan.

Indikator sasaran 1 didukung oleh program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan indikator program persentase OPD dengan nilai dokumen perencanaan minimal baik. Adapun kegiatan yang mendukung program ini adalah kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dengan subkegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD); Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan; Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan; Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia; Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang

Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) dengan subkegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD). Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dengan subkegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD); Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur; Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD).

## 2) Capaian IKU Daerah

Capaian IKU pada tahun 2023 berhasil mengalami peningkatan sebesar 3,71% menjadi 48,15% dibanding tahun 2022 yang tercapai sebesar 44,44%. Rendahnya capaian realisasi dari target akibat adanya penurunan capaian kinerja dan/atau mengalami kesalahan interpretasi dalam penetapan target pada RPJMD Tahun 2021-2026, seperti Indeks Ketahanan Daerah; Predikat Kabupaten Peduli HAM yang mengalami penyesuaian predikat tertinggi hanya pada level “Peduli” sesuai SK dari Kemenkumham; Indeks Reformasi Birokrasi; Indeks Profesionalitas ASN; Angka Kriminalitas, dan Predikat Kabupaten Layak Anak. Sisanya mengalami penurunan dalam tingkat pencapaian kinerja, yakni perbandingan antara realisasi dan target yang telah ditetapkan pada tahun tersebut, seperti: Nilai SAKIP; Level Maturitas SPIP; Indeks Pembangunan Gender; Indeks Pemberdayaan Gender; Rata-rata Harapan Lama Sekolah; dan Laju Pertumbuhan Penduduk.

Tabel 3.6 Perkembangan Capaian IKU Daerah tahun 2021-2023

<b>Ketercapaian Indikator</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
IKU tercapai (100%)	11 IKU	12 IKU	13 IKU
IKU tidak tercapai (100%)	16 IKU	15 IKU	14 IKU
Total IKU Daerah	27 IKU	27 IKU	27 IKU
<b>Capaian IKU Daerah</b>	<b>40,74%</b>	<b>44,44%</b>	<b>48,15%</b>
Rerata Capaian	95,98%	93,61%	93,91%

Sumber : data diolah, Bappelitbangda 2024

Untuk mengatasi hambatan ketidak sesuaian indikator kinerja PD serta meningkatkan capaian IKU Daerah pada tahun 2023, maka Bappelitbangda berupaya melakukan monitoring melalui laporan realisasi per triwulan serta reviu atas capaian realisasi target indikator. Upaya ini dilakukan secara intesif dan berkala dengan melibatkan bidang-bidang teknis selaku koordinator *Person in Charge* (PIC) dalam melakukan pendampingan terhadap PD. Hal ini dilakukan agar tidak ada lagi indikator kinerja yang tidak sesuai dengan capaian Renstra dan PK PD. Peran aktif Bappelitbangda dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi dalam rangka pengendalian perencanaan dan pembangunan daerah menjadikan PD secara situasional menjadikan PD untuk berkomitmen dan terlibat aktif untuk mencapai 27 indikator IKU.

Persentase capaian IKU daerah didukung oleh program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah dan subkegiatan Monitoring Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah.

## 3) Persentase Pencapaian Nilai Komponen Perencanaan pada Penilaian SAKIP

Dari hasil perhitungan, persentase pencapaian nilai komponen perencanaan pada penilaian SAKIP adalah 77,73% dari target tahun 2023 sebesar 81%. Berdasarkan hasil evaluasi dari Kemenpanrb, tidak tercapainya target disebabkan karena masih terdapat hal yang menjadi catatan dalam perencanaan kinerja PD lingkup Kabupaten Pasaman Barat, yakni:

- a) Masih adanya indikator kinerja yang belum memenuhi kriteria spesifik, terukur, relevan dan cukup dalam mendukung sasaran Pemda “Masyarakat yang Agamis dan Berbudaya”;
- b) Terdapat ketidakselarasan indikator PD atas Renstra, PK, dan indikator utama sehingga tidak tergambar kinerja yang ingin dicapai;
- c) Sebagian besar PD pada dasarnya telah menyusun dokumen penjenjangan kinerja namun belum memiliki kualitas yang baik sesuai *Critical Success Factor (CSF)*.

Tabel 3.7 Perkembangan Persentase Pencapaian Nilai Komponen Perencanaan pada Penilaian SAKIP Tahun 2021-2023

No.	Komponen Penilaian	2021	2022	2023	Ket.
1	<b>Perencanaan Kinerja</b>	<b>23,24</b>	<b>23,25</b>	<b>23,32</b>	1. Data 2021, hasil evaluasi AKIP berdasarkan surat Kemenpanrb Nomor B/191/AA.05/2022 2. Data 2022, hasil evaluasi AKIP berdasarkan surat Kemenpanrb Nomor B/880/AA.05/2022 3. Data 2023, hasil evaluasi AKIP berdasarkan surat Kemenpanrb Nomor B/196/AA.05/2023
2	Pengukuran Kinerja	13,42	13,69	13,73	
3	Pelaporan Kinerja	9,32	9,90	9,96	
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	15,28	15,40	12,69	
5	Nilai Hasil Evaluasi	61,26	62,24	62,70	
<b>Ketercapaian Indikator</b>					
	Hasil Penilaian Komponen Perencanaan Kinerja	23,24	23,25	23,32	Secara tren mengalami peningkatan/perbaikan
	Bobot Komponen	30	30	30	
	Persentase pencapaian nilai komponen perencanaan (Nilai komponen perencanaan / Nilai Komponen Tertinggi (Bobot) x 100%)	77,47	77,50	77,73	

Sumber : data diolah, Bappelitbangda 2024

Berdasarkan tren penilaian 3 tahun terakhir pada tahun 2023 ini telah terjadi perbaikan secara bertahap terhadap komponen perencanaan tersebut yang ditandai dengan kenaikan skor dari tahun sebelumnya. Hal ini didorong oleh adanya peningkatan koordinasi, reviu dan harmonisasi antara Bappelitbangda, PD, BKAD, Inspektorat dan Kemenkumham, sehingga meningkatkan kualitas dokumen perencanaan secara keseluruhan. Kedepan juga perlu ditingkatkan komitmen pimpinan daerah dan pimpinan PD akan pentingnya implementasi SAKIP pada masing-masing instansi karena komitmen yang kuat dari pimpinan instansi pemerintah untuk menciptakan *good governance* dan *clean government* di lingkungan kerjanya merupakan faktor terpenting dalam mewujudkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Beberapa perbaikan yang akan dilakukan adalah:

- a) Melakukan reviu dan perbaikan dokumen cascading kinerja baik di level Pemda maupun PD untuk memastikan kualitas penjenjangan kinerja dari level tertinggi hingga terendah dapat berorientasi hasil sesuai dengan levelnya dengan memerhatikan *logical framework* dan *critical success factor* dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Sehingga program dan kegiatan yang disusun dapat efektif dan efisien dalam menyelesaikan isu strategis daerah. Proses reviu dan perbaikan tersebut agar berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
- b) Melakukan reviu dan perbaikan dokumen perencanaan setiap PD dengan memastikan bahwa tujuan dan sasaran strategis yang dikawal oleh setiap PD

telah berorientasi hasil atau berdampak langsung kepada masyarakat (*result oriented*) dan memiliki kualitas indikator kinerja yang memenuhi kriteria yang SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Relevant, and Time-bound*) dan memenuhi unsur cukup dalam mengawal kinerja;

c) Memanfaatkan hasil perbaikan cascading kinerja untuk memilah program dan kegiatan apa saja yang tidak relevan dengan sasaran strategis yang ingin dicapai dan berpotensi menimbulkan inefisiensi dan inefektivitas dalam mencapai kinerja organisasi.

## 2. Sasaran 2 : Meningkatnya Peran Kelitbangan Dan Inovasi Dalam Pembangunan

1) Persentase implementasi kelitbangan

Sasaran ini didukung dengan program Penelitian dan Pengembangan daerah dengan dua kegiatan yaitu Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan dengan subkegiatan Pengelolaan Data Kelitbangan. Pada tahun 2021, data perhitungan persentase kelitbangan belum tersedia sehingga tidak dapat terukur capaian kinerjanya. Untuk mengatasi hal ini, pada tahun 2022 disepakati kembali definisi operasional persentase implementasi kelitbangan.

Tabel 3.8 Perkembangan Kajian Kelitbangan PD Tahun 2021-2023

Ketercapaian Indikator	2021	2022	2023
Jumlah Kajian Kelitbangan yang ditindaklanjuti	-	3	7
Jumlah Kajian Kelitbangan dalam Renja PD	-	3	7

Sumber : data diolah, Bappelitbangda 2024

Faktor keberhasilan persentase implementasi kelitbangan, antara lain:

a) Adanya komitmen dan kesadaran PD mengingat pentingnya untuk tetap melaksanakan kajian sebelum melaksanakan perencanaan pembangunan;

b) Adanya fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan dan pengkajian;

c) Adanya koordinasi dengan Balitbangda Provinsi Sumatera Barat.

Sementara faktor penghambat capaian ini adalah kurang tersedianya data dukung kajian Kelitbangan, judul penelitian yang belum ditetapkan karena para Peneliti belum menentukan fokus penelitian yang akan dikajikan dalam kabupaten. Upaya yang perlu dilakukan untuk tahun yang akan datang adalah menetapkan kajian yang akan dilakukan penelitian dan meningkatkan kualitas data kajian. Sementara upaya yang telah dilaksanakan untuk meningkatkan capaian ini yaitu:

a) Keikutsertaan pada Forum PD dan Forum Peneliti di bawah koordinasi Balitbangda Provinsi Sumatera Barat dan pendampingan dalam pelaksanaan Musrenbang mulai tingkat Nagari, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi

b) Mengikuti Rapat Koordinasi Kelitbangan

c) Melaksanakan kolaborasi riset bersama BRIN dan Balitbangda Provinsi Sumatera Barat dengan kemitraan anggaran

2) Kategori Capaian *Innovation Government Award* (IGA)

Sasaran ini didukung dengan program Penelitian dan Pengembangan daerah dengan kegiatan yaitu Pengembangan Inovasi dan Teknologi dengan subkegiatan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif. Tercapainya indikator target ini diukur oleh beberapa faktor, yaitu:

- a) Tingginya komitmen dan motivasi JF Peneliti untuk mengawal dan memfasilitasi kajian kelitbangsan PD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat;
- b) Tingginya komitmen dan antusias seluruh pihak yang terlibat dalam meningkatkan inovasi di instansinya masing-masing melalui MoU, dimana diwajibkan setiap PD, Puskesmas dan Nagari melaksanakan minimal 2 inovasi;
- c) Meningkatnya koordinasi secara berkala dengan Balitbangda Provinsi Sumatera Barat, PD, Puskesmas dan Nagari;
- d) Meningkatnya kualitas data dukung kelengkapan administrasi untuk diinput pada aplikasi IGA.

Tabel 3.9 Perkembangan Capaian IGA Tahun 2021-2023

Ketercapaian Indikator	2021	2022	2023
Jumlah Inovasi yang di entri ke IGA	25 inovasi	30 inovasi	33 inovasi
Skor	36,32	42,83	55,03
<b>Kategori</b>	<b>Inovatif</b>	<b>Inovatif</b>	<b>Inovatif</b>

Sumber : data diolah, Bappelitbangda 2024

Meskipun Kabupaten Pasaman Barat berhasil mendapat predikat sebagai “Kabupaten Inovatif”, namun masih terdapat beberapa faktor penghambat pencapaian IGA, yaitu:

- a) Masih rendahnya ketersediaan data dukung kelengkapan administrasi bagi PD, Puskesmas, dan Nagari yang telah menjalankan inovasi sehingga mengurangi nilai dan/atau bahkan tidak bisa didaftarkan pada ajang IGA;
- b) Masih rendahnya kematangan dokumen kelengkapan inovasi yang akan didaftarkan pada ajang IGA;
- c) Masih rendahnya pemahaman PD, Puskesmas dan Nagari tentang inovasi untuk memunculkan ide inovasi-inovasi baru.

Untuk meningkatkan capaian sasaran ini dibutuhkan beberapa upaya, antara lain:

- a) Meningkatkan pendampingan dan konsultasi inovasi bagi PD, Puskesmas dan Nagari oleh Bappelitbangda melalui “klinik inovasi” di bidang Litbang;
- b) Penumbuhan inovasi sebagai solusi permasalahan pembangunan melalui sosialisasi/informasi secara intensif khusunya dalam mengenal tahapan dan persyaratan inovasi bagi PD, Puskesmas dan Nagari yang belum menjalankan inovasi;
- c) Adanya bimbingan teknis penginputan Indeks Inovasi Daerah dengan melibatkan seluruh PD, Puskesmas dan Nagari;

Pelaksanaan evaluasi IGA tahun lalu terhadap data dukung indikator inovasi untuk meningkatkan IGA tahun berikutnya.

### 3. Sasaran 3 : Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Bappelitbangda

Sasaran ketiga didukung oleh program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah. Terpenuhinya penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja (pelaporan) program dan kegiatan Bappelitbangda, terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran, terpenuhinya kebutuhan pelayanan sarana dan prasarana penunjang operasional perkantoran, peningkatan kapasitas aparatur yang professional, terlaksananya pelaporan pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran.

#### 1) Nilai SAKIP Bappelitbangda

Pada tahun 2021, nilai SAKIP Bappelitbangda mendapat predikat AA kemudian turun menjadi BB pada tahun 2022 akibat adanya perubahan metode perhitungan. Secara skor, pada tahun 2023 mengalami penurunan, hal ini disebabkan oleh faktor penghambat, antara lain:

- a) Masih rendahnya kesadaran dan pemahaman pegawai Bappelitbangda terhadap pencapaian Perjanjian Kinerja di setiap level dan SKP individu.
- b) Tingginya beban kerja JF Perencana menjadi sebab rendahnya fokus dan kualitas dalam menyusun dokumen perencanaan;
- c) Belum didukungnya pemanfaatan teknologi aplikasi dalam pengendalian dan mengevaluasi capaian kinerja Bappelitbangda;

Tabel 3.10 Perkembangan Nilai SAKIP Bappelitbangda Tahun 2021-2023

No	Indikator capaian	2021	2022	2023
1	Perencanaan Kinerja	27,17	25,2	23,7
2	Pengukuran Kinerja	23,41	21,6	20,7
3	Pelaporan Kinerja	14,13	10,05	12,3
4	AKIP	8,93	17,5	16,25
5	Pencapaian Sasaran	18,13		
<b>Predikat/Nilai</b>		<b>AA/91,77</b>	<b>BB/74,35</b>	<b>BB/72,95</b>

Sumber : data diolah, Bappelitbangda 2024

Meski demikian, capaian realisasi tetap mencapai target yang telah ditetapkan pada tahun 2023. Faktor pendorong yang menyebabkan keberhasilan pencapaian SAKIP Bappelitbangda antara lain:

- a) Tingginya komitmen seluruh pihak yang terlibat dalam perencanaan untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah;
- b) Adanya efisiensi anggaran yang dilakukan Bappelitbangda selama tahun 2023, namun keberhasilan kinerja secara fisik tetap mencapai angka 100%;
- c) Telah dipenuhinya komponen penilaian kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya.

Upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan nilai SAKIP Bappelitbangda sepanjang tahun 2023 adalah:

- a) Telah ditetapkan SOP Penyusunan Indikator Kinerja Bappelitbangda (level Program, Kegiatan dan Subkegiatan);
- b) Pengukuran kinerja Bappelitbangda telah mengikuti prosedur SMART (*Spesific, Measurable, Achievable, Reliable, dan Time Bound*), menggunakan penyelarasan (*cascading*) di setiap level secara logis serta memperhatikan kinerja bidang lain (*crosscutting*);
- c) Penguatan pendalaman capaian indikator sasaran dan program/kegiatan/subkegiatan melalui inovasi Ngopi (Ngobrol Pintar) Perencana.

## 2) Level Maturitas SPIP

Faktor pendorong keberhasilan Bappelitbangda dalam mencapai sasaran Level Maturitas SPIP, yaitu:

- a) Meningkatnya koordinasi antara BPKP dengan Pemerintah Pasaman Barat dalam mendorong penerapan SPIP terintegrasi sejak tahun 2023;
- b) Meningkatnya komitmen pimpinan daerah dalam rangka menurunkan temuan dengan menerapkan SPIP;
- c) Penyempurnaan dokumen perencanaan PD melalui mekanisme Perubahan Renstra, sehingga menjamin setiap sasaran strategis, program/kegiatan/subkegiatan menjadi lebih terukur (indikator SMART-C) dan berorientasi pada hasil.

Tabel 3.11 Perkembangan Capaian Level Maturitas SPIP Bappelitbangda

Indikator Capaian	2021	2022	2023
Level Maturitas SPIP	Level 3	Level 3	Level 3

Sumber : data diolah, Bappelitbangda 2024

Faktor penghambat dalam meningkatkan capaian indikator Level Maturitas SPIP:

- a) Belum meratanya pemahaman OPD untuk mengisi kertas kerja penilaian SPIP dan penerapan SPIP;
- b) Belum meratanya pemahaman OPD dalam memahami manajemen risiko;
- c) Pendampingan oleh instansi pengampu kepada OPD dalam penerapan SPIP dirasa belum memadai sesuai tuntutan yang harus dipenuhi oleh PD.

Upaya yang dilakukan untuk capaian ini adalah Bappelitbangda terus melakukan perbaikan secara berkelanjutan, yakni dengan tetap melakukan penyusunan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) yang berisi tentang strategi terhadap pengelolaan/manajemen risiko pada setiap memulai pelaksanaan perencanaan pembangunan. Selain itu, secara terus-menerus juga dilakukan monitoring terhadap pelaksanaan 4 (empat) pilar yang menjadi tujuan SPIP, yakni efektivitas dan efisiensi penyelenggaran pemerintahan, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan melalui pelaksanaan rapat internal Bappelitbangda secara rutin dalam rangka pengawalan terhadap proses perencanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan, mendorong pemahaman setiap individu pegawai Bappelitbangda agar semakin memahami dan mampu mendefinisikan kinerja yang telah dituangkan pada dokumen Perjanjian Kinerja (PK), melaksanakan sosialisasi anti korupsi, serta optimalisasi dalam penerapan sistem perencanaan/penganggaran dan penatausahaan keuangan/aset daerah yang berbasis teknologi informasi.

### 3) Persentase penurunan jumlah temuan BPK atas laporan keuangan Bappelitbangda

Signifikannya penurunan jumlah temuan Inspektorat dan BPK juga tidak luput dari intesifnya upaya bersama pimpinan dengan aparatur Bappelitbangda untuk menurunkan jumlah temuan. Upaya pertama yang dilakukan adalah diseminasi dan sosialisasi anti korupsi yang diadakan di kantor Bappelitbangda. Selain itu, reviu RKA berkala yang dilakukan oleh Inspektorat dan BKAD. Namun upaya tersebut masih terkendala dalam *updating* data dan informasi SBU dan SSH.

Sementara untuk faktor penghambat pencapaian target kinerja indikator ini diantaranya belum memadainya pendampingan oleh instansi teknis pengelola keuangan daerah dalam implementasi SIPD di seluruh PD, terdapat keterlambatan dalam penyusunan dokumen pendukung penyusunan anggaran (RKA) seperti SBU/SSH, serta tata laksana tahapan penganggaran yang tidak disusun secara terencana dan sistematis.

Tabel 3.12 Perkembangan Capaian Penurunan Jumlah Temuan BPK atas Laporan Keuangan Bappelitbangda Tahun 2021-2023

Indikator Capaian	2021	2022	2023
Temuan BPK atas laporan keuangan Bappelitbangda	0 temuan	0 temuan	0 temuan

Sumber : data diolah, Bappelitbangda 2024

### 4) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Tercapainya sasaran ini didukung oleh adanya pemanfaatan teknologi, tingginya komitmen dalam meningkatkan pelayanan publik, adanya komitmen untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, serta adanya keterbukaan informasi. Faktor penghambat dalam pelaksanaan survei ini adalah

belumcapaian sasaran ini, diantaranya adalah belum optimalnya penggunaan *scan barcode* dalam mengisi kuesioner survei kepuasan masyarakat. Salah satu upaya yang dilakukan Bappelitbangda agar tingkat keterisian survei tinggi adalah dengan intensifikasi mengajak setiap penerima manfaat atau relasi Bappelitbangda untuk ikut ambil bagian dalam memberikan penilaian pelayanan yang diberikan aparatur Bappelitbangda. Selain itu, setiap bidang dan *front office* dapat dengan mudah ditemukan stiker *barcode* untuk memudahkan responden dalam memberikan penilaian.

Tabel 3.13 Perkembangan Capaian IKM Tahun 2021-2023

Indikator Capaian	2021	2022	2023
Indeks Kepuasan Masyarakat	NA	NA	81,94

Sumber : data diolah, Bappelitbangda 2024

### 3.6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Anggaran merupakan alat bagi pemerintah untuk menjalankan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam menunjang capaian sasaran organisasi. Semakin tinggi penyerapan anggaran maka output (realisasi) kegiatan semakin tercapai, namun harus mampu menghemat anggaran agar tidak terjadi pemborosan. Suatu anggaran dikatakan efisien apabila anggaran tersebut dapat dihemat. Pada tahun 2023 terjadi desifisit anggaran di level Pemerintah Kabupaten yang berdampak pada pengurangan anggaran disetiap OPD yang ada di lingkungan Kabupaten Pasaman Barat untuk menutup defisit tersebut. Terdapat beberapa subkegiatan yang terdampak di tahun 2023 seperti subkegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut Kelengkapannya, Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi, Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan, Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan, Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Analisis Data dan Informasi, Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota. Penghematan diberlakukan terutama pada belanja perjalanan dinas, ATK, Pencetakan dan Penggandaan. Awalnya anggaran Bappelitbangda berdasarkan Renja Bappelitbangda tahun 2023 adalah sebesar Rp6.151.421.530,00 mendapatkan tambahan untuk pembayaran Honorarium Tim Penyusun RPJPD Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2025-2045 dan RKPD Tahun 2024 menjadi Rp6.300.189.555,00 pada Perubahan Renja Bappelitbangda tahun 2023. Namun karena adanya efisiensi pembayaran honorarium tidak dibayarkan 100% sesuai rencana. Realisasi anggaran Bappelitbangda tahun 2023 sebesar Rp5.522.959.976,00 atau sebesar 87,66%.

### 3.7. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian

Bappelitbangda melaksanakan 4 Program sesuai Renja Bappelitbangda tahun 2023 dengan 16 kegiatan dan 42 subkegiatan. Secara umum, hampir setiap subkegiatan mendapatkan efisiensi anggaran untuk menambah defisit anggaran di Kabupaten. Rasionalisasi anggaran mendapat porsi terbesar terutama pada subkegiatan Sosialisasi, Pendidikan dan Pelatihan, Bimbingan Teknis, Pengadaan Pakaian Dinas.

#### 1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Output kegiatan berupa dokumen perencanaan (6 dokumen) dan dokumen pelaporan/evaluasi (2 dokumen) yang menjadi kewajiban perangkat daerah dalam pelaksanaan anggaran setiap tahunnya, terdiri dari:

1. Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Bappelitbangda Tahun 2021-2026
2. Rencana Kerja (Renja) Bappelitbangda Tahun 2023
3. Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Bappelitbangda Tahun 2023
4. Perjanjian Kinerja (PK) Bappelitbangda Tahun 2023
5. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bappelitbangda Tahun 2023 (SIPD dan SIMDA)

6. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Bappelitbangda Tahun 2023 (SIPD dan SIMDA)
7. Laporan Keterangan dan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Bappelitbangda Tahun 2023
8. Laporan Kinerja (LKj) Bappelitbangda Tahun 2023.

Realisasi anggaran ini sebesar Rp26.308.355,00 dengan capaian sebesar 57% dan capain fisik sebesar 100%. Kegiatan ini terlaksana dengan prediket **sangat tinggi** dan sisa anggaran hanya berupa rasionalisasi pelaksanaan kegiatan dengan target yang dapat dicapai secara keseluruhan.

## **2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**

Bentuk sub kegiatan berupa penyediaan gaji dan tunjangan yang melekat pada jabatan PNS termasuk tambahan penghasilan berdasarkan beban kerjanya sejumlah 31 orang PNS, pemenuhan honorarium petugas pengelola keuangan sejumlah 7 orang PNS dan pembayaran jasa tenaga administrasi sejumlah 2 orang PTT dan 6 orang THL

Realisasi anggaran ini sebesar Rp3.525.740.967,00 dengan capaian sebesar 95% dan capain fisik sebesar 100%. Kegiatan ini terlaksana dengan prediket **sangat tinggi** dan sisa anggaran hanya berupa rasionalisasi pelaksanaan kegiatan.

## **3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**

Bentuk sub kegiatan berupa penyediaan honorarium petugas pengelola keuangan pengurus barang dan pembantu pengurus barang sebanyak 2 orang PNS, dan jasa tenaga keamanan sebanyak 2 orang THL berikut fasilitasi makanan/minuman penambah daya tahan tubuh piket malam. Adapun BMD pada Bappelitbangda yang menjadi tanggung jawab pengelola BMD sejumlah 674 unit. Realisasi anggarn ini sebesar Rp35.320.000,00 dengan capaian sebesar 79% dan capain fisik sebesar 100%. Kegiatan ini terlaksana dengan prediket **tinggi** dan sisa anggaran hanya berupa rasionalisasi pelaksanaan kegiatan dengan target yang dapat dicapai secara keseluruhan.

## **4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**

Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dalam perencanaannya dilaksanakan dalam 3 subkegiatan, yaitu:

1. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi;
2. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan;
3. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan.

Realisasi anggaran ini sebesar Rp27.405.450,00 dengan capaian sebesar 17% dan capain fisik sebesar 100%. Kegiatan ini terlaksana dengan prediket **sangat rendah**. Anggaran subkegiatan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis diarahkan untuk defisit anggaran, sedangkan pendidikan dan pelatihan pegawai terealisasi untuk Latihan Dasar 1 orang CPNS di Talu.

## **5. Administrasi Umum Perangkat Daerah**

Bentuk subkegiatan berupa penyediaan sarana dan prasarana pendukung operasional perkantoran, seperti penyediaan komponen instalasi listrik gedung kantor, alat pembersih, alat tulis kantor (ATK), penyediaan barang cetak (map, amplop, blanko), dan fasilitasi perjalanan dinas dalam rangka kordinasi/konsultasi/asistensi pelaksanaan program/kegiatan pembangunan yang dilaksanakan lingkup Bappelitbangda dan Kabupaten Pasaman Barat ke pemerintah pusat (K/L) dan provinsi Sumatera Barat.

Realisasi anggaran ini sebesar Rp314.458.805,00 dengan capaian sebesar 90% dan capain fisik sebesar 100%. Kegiatan ini terlaksana dengan prediket **sangat tinggi** dan sisa anggaran hanya berupa rasionalisasi pelaksanaan kegiatan dengan target yang dapat dicapai secara keseluruhan.

## **6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

Kegiatan ini memiliki subkegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya. Pengadaan yang direalisasikan berupa:

1. Mixer : 1 unit

2. Mic Conference Chairman : 12 unit
3. Mic Conference Power Supply : 1 unit
4. Mic Wireless : 1 unit
5. Printer : 1 unit
6. AC Split : 2 unit
7. PC All in One : 1 unit

Realisasi anggaran ini sebesar Rp127.915.000,00 dengan capaian sebesar 96% dan capain fisik sebesar 100%. Pada awal Renja Bappelitbangda menargetkan 1 unit pengadaan, namun pada saat proses KUA-PPAS Bappelitbangda mendapat tambahan anggaran, anggaran ini didistribusikan untuk kebutuhan pengadaan peralatan operasional kantor sehingga realisasi fisik subkegiatan ini mencapai 19 unit. Kegiatan ini terlaksana dengan prediket **sangat tinggi** dan sisa anggaran hanya berupa rasionalisasi pelaksanaan kegiatan dengan target yang dapat dicapai secara keseluruhan.

#### **7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

Bentuk sub kegiatan berupa penyediaan jasa sumber daya listrik dan air (pembayaran tagihan listrik dan air) untuk kelancaran operasionalisasi kantor dalam mendukung setiap aktivitas yang dilaksanakan oleh pegawai selama berada di kantor. Selain itu juga untuk pembayaran jasa tenaga kebersihan sejumlah 2 orang THL dan petugas khusus pembersihan landscape kantor Bappelitbangda yang bertanggung jawab terhadap kebersihan dan keindahan kantor Bappelitbangda.

Realisasi anggaran ini sebesar Rp131.583.826,00 dengan capaian sebesar 76% dan capain fisik sebesar 100%. Kegiatan ini terlaksana dengan prediket **sangat tinggi** dan sisa anggaran hanya berupa rasionalisasi pelaksanaan kegiatan dengan target yang dapat dicapai secara keseluruhan.

#### **8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

Subkegiatan berupa penyediaan jasa pemeliharaan kendaraan dinas (5 kendaraan dinas roda 4 dan 15 kendaraan dinas roda 2), pembayaran pajak/KIR dan retribusi kendaraan/peralatan kemanan gedung kantor/kebersihan serta pembayaran jasa tenaga supir sejumlah 2 orang PTT dan 2 orang THL dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas perkantoran. Selain itu juga untuk penyediaan jasa pemeliharaan peralatan mesin sebagai pendukung operasionalisasi gedung dan administrasi perkantoran, dengan rincian dari 53 unit mesin dan peralatan, hanya 42 unit yang dapat direalisasikan pemeliharaannya. Yang tidak bisa dilakukan pemeliharaannya adalah satu unit mesin potong rumput, 4 unit Komputer/laptop, 2 unit AC, 2 unit printer. Hal ini karena menyesuaikan kebutuhan saja.

Realisasi anggaran ini sebesar Rp197.761.284,00 dengan capaian sebesar 92% dan capain fisik sebesar 100%. Kegiatan ini terlaksana dengan prediket **sangat tinggi** dan sisa anggaran hanya berupa rasionalisasi pelaksanaan kegiatan dengan target yang dapat dicapai secara keseluruhan.

#### **9. Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan**

Kegiatan ini memiliki sub kegiatan berupa:

1. Subkegiatan Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah
2. Subkegiatan Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD
3. Subkegiatan Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan
4. Subkegiatan Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota
5. Subkegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota

Realisasi anggaran ini sebesar Rp315.548.260,00 dengan capaian sebesar 95% dan capain fisik sebesar 100%. Kegiatan ini terlaksana dengan prediket **sangat tinggi (100%)** dan sisa anggaran hanya berupa rasionalisasi pelaksanaan kegiatan dengan target yang dapat dicapai secara keseluruhan.

#### **10. Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah**

Kegiatan ini memiliki dua sub kegiatan yaitu, Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota. Realisasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp18.204.043,00 atau terealisasi sebesar 28,37% dan capaian fisik 100%. Kegiatan ini terlaksana dengan prediket **sangat tinggi (100%)** dan subkegiatan ini termasuk subkegiatan yang mengalami dampak besar efisiensi anggaran.

## **11. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**

Kegiatan ini memiliki subkegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2023. Output yang dicapai antara lain: laporan evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah, laporan DAK, Laporan Evaluasi Program Unggulan Kabupaten Pasaman Barat. Laporan RKPD disampaikan pada Bappeda Provinsi Sumatera Barat dan menjadi bagian dalam penyusunan RKPD sedangkan laporan DAK disampaikan kepada Dirjen Pembangunan Daerah, Kementerian Lembaga dan bappeda Provinsi Sumatera Barat setiap triwulan.

Adapun jumlah anggaran pada sub kegiatan ini adalah Rp.83.196.900,00 dengan realisasi keuangan Rp43.169.350,00 atau sebesar 51,88%, sedangkan realisasi fisik sebesar 100%. Kegiatan ini terlaksana dengan prediket **sangat tinggi (100%)** dan sisa anggaran hanya berupa rasionalisasi anggaran.

## **12. Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**

Subkegiatan pada kegiatan ini antara lain:

1. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)
2. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan
3. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan
4. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
5. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia

Realisasi anggaran kegiatan ini adalah sebesar Rp264.076.654,00 atau sebesar 75,73% dan capaian fisik sebesar 100%. Kegiatan ini terlaksana dengan prediket **sangat tinggi (100%)** dan sisa anggaran hanya berupa rasionalisasi pelaksanaan kegiatan dengan target yang dapat dicapai secara keseluruhan.

Output kegiatan ini adalah penyusunan dokumen Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs, monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan berbasis analisis gender, mengakomodir misi ketiga RPJMD Kabupaten Pasaman Barat tahun 2021-2026 yaitu peningkatan sumber daya manusia melalui penanggulangan kemiskinan, pencegahan dan percepatan penurunan stunting. Beberapa masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan ini antara lain, koordinasi antar OPD atau tim TPPS belum maksimal, kualitas data belum maksimal, keterlibatan dan dukungan dari luar pemerintah belum optimal, proses intervensi sasaran belum sepenuhnya menyasar *by name by address*. Perbaikan demi perbaikan terus diupayakan bukan hanya untuk memenuhi capaian kinerja tetapi juga harus memiliki dampak nyata dan langsung bisa dirasakan oleh masyarakat. Peningkatan koordinasi pihak di luar pemerintah terus dikembangkan agar pencapaian misi dapat terwujud. Selain itu, dilakukan pula upaya perbaikan pengumpulan data dengan cara menyandingkan data P3KE, data penerima bansos, data kemiskinan Baznas, termasuk data pembangunan infrastruktur yang menyasar pengendalian kemiskinan.

## **13. Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)**

Pada kegiatan ini terdapat subkegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen

Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD). Melakukan koordinasi pendataan usulan terhadap UMKM yang telah mempunyai NIB secara resmi dari Dinas Koperasi, Perdagangan dan UKM Kab. Pasaman Barat beberapa OPD yang melingkupi kegiatan millennial entrepreneur sebagai bentuk upaya pengembangan ekonomi kreatif dan dunia usaha berbasis digital dalam rangka perolehan bantuan kelayakan pendanaan dan dunia usaha; fasilitasi dan keikutsertaan upaya pencegahan/penekanan laju inflasi daerah khususnya Kabupaten Pasaman Barat; Upaya percepatan program unggulan ekonomi; upaya peningkatan hasil pertanian dan swasembada pangan melalui perkuatan kelembagaan yang ada (Satgas Pangan) dalam rangka kestabilan pangan dan mencegah inflasi terhadap 20 bahan pokok yang menjadi pemicu laju inflasi.

Realisasi anggaran kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian dan SDA tahun 2023 sebesar Rp53.710.350,00 atau sebesar 104% dengan capaian fisik sebesar 100%. Kegiatan ini terlaksana dengan prediket **sangat tinggi**.

#### **14. Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayah**

Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayah Kabupaten Pasaman Barat merupakan kerangka pelaksanaan kegiatan pada Program dan Bidang Keciptakaryaan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai Urusan Wajib Pelayanan Dasar dari Program RPJMN, RPJMD Provinsi sampai RPJMD Kabupaten/Kota. Penjabaran kegiatan ini meliputi sarana, prasarana dan infrastruktur dasar meliputi perumahan dan permukiman, sanitasi dan penyehatan lingkungan, penataaan kawasan dan permukiman kumuh, pemenuhan air bersih/ air minum dan air limbah kawasan serta drainase kawasan lingkup Satuan Kerja Rencana Pengendalian dan Program (Satker Randal) terdiri dari satker air minum (PK PAM), satker PLP (Penyehatan Lingkungan Permukiman), satker PBL (Penataan Bangunan dan Lingkungan). Urusan Keciptakaryaan dalam penjabaran anggarannya baik APBN, APBD Provinsi maupun APBD Kabupaten/Kota mengacu kepada dokumen pelaksanaan Program Rencana Infrastruktur Jangka Menengah (RPIJM) Kabupaten yang tingkatannya sama dengan RPJMD Kabupaten, dan pencapaian target SPM Pelayanan Dasar. Perbedaannya RPIJM hanya mencakup kegiatan keciptakaryaan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia melalui Dirjen Keciptakarayaan. RPIJM dimaksud sekarang telah berbasis aplikasi yaitu sistem aplikasi SI SPKP terdiri dari SiPPa, Sibaru dan sebagainya pada Kementerian PUPR dan telah diberi admin masing-masing Kabupaten tepatnya pada Dinas PUPR, Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup, PDAM dan DPKP Kabupaten Pasaman Barat untuk diupdate oleh operator/satgas SiPPa yang ditunjuk/ditetapkan melalui SK Bupati Pasaman Barat tiap tahunnya. Hasil Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayah adalah terkoordinir dan termonitoringnya pelaksanaan kegiatan program infrastruktur dan permukiman Kabupaten Pasaman Barat melalui evaluasi Dokumen RPIJM dan Matrik Program (MP) pada lampiran dokumen Rencana Pembangunan Infrastruktur Jangka Menengah (RPIJM) dan aplikasi SI SPKP, SiPPa, Sibaru Kabupaten Pasaman Barat untuk periodisasi usulan tahun 2024-2025.

Realisasi anggaran kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayah Kabupaten Pasaman Barat pada anggaran perubahan tahun 2023 sebesar Rp229.035.447,00 atau sebesar 95% dengan capaian realisasi fisik sebesar 100%. Kegiatan ini terlaksana dengan prediket **sangat tinggi** dan sisa anggaran hanya berupa rasionalisasi pelaksanaan kegiatan dengan target yang dapat dicapai secara keseluruhan.

#### **15. Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan**

Subkegiatan dari kegiatan ini adalah Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan. Sub kegiatan pengelolaan data kelitbangan dan peraturan merupakan sub kegiatan yang dilakukan dalam rangka mendukung tupoksi bidang penelitian

dan pengembangan. Out put subkegiatan ini berupa rekomendasi, model, pilot *project*/percontohan dapat direplikasi sesuai dengan peraturan yang berlaku sebagai salah satu masukan bagi perencanaan pembangunan daerah. Beberapa jenis kegiatan yang dilaksanakan untuk memenuhi target tersebut adalah pelaksanaan fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan dan pengkajian; koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang riset, penelitian, pengembangan dan pengkajian; pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan dan penyelenggaraan pengkajian.

Realisasi keuangan pada kegiatan ini adalah sebesar Rp66.216.853,00 atau sebesar 95% dengan capaian realisasi fisik sebesar 100%. Kegiatan ini terlaksana dengan prediket **sangat tinggi** dan sisa anggaran hanya berupa rasionalisasi pelaksanaan kegiatan dengan target yang dapat dicapai secara keseluruhan.

#### **16. Pengembangan Inovasi dan Teknologi**

Subkegiatan pada kegiatan ini adalah Diseminasi Jenis, Prosedur Dan Metode Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Yang Bersifat Inovatif. Jenis kegiatan yang dilakukan pada kegiatan ini adalah keikutsertaan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat pada ajang *Innovative Government Award* (IGA) 2023. Bappelitbangda pada bidang Penelitian dan Pengembangan daerah mengkoordinir OPD untuk melaksanakan inovasi yang telah menjadi kesepakatan bersama dalam MOU, telah dilakukan rapat persiapan penilaian inovasi daerah, Sosialisasi penginputan Inovasi dan penilaian IGA 2023 yang dihadiri oleh OPD se-Kabupaten Pasaman Barat beserta masing-masing operator OPD yang akan melakukan peng-inputan data. Tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat mendapat kategori Inovatif sesuai target tahun 2023 yang tertuang dalam Renja Bappelitbangda dengan perolehan skor 55,03. Nilai ini mengalami kenaikan dari tahun 2022 dengan peningkatan sebesar 12,2.

Penilaian Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) yang bertujuan untuk mengukur kinerja tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel Bappelitbangda Kabupaten Pasaman Barat. Pengukuran IPKD juga bertujuan untuk memacu dan memotivasi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah dan melakukan publikasi atas hasil pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah bagi pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota sehingga meningkatkan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dalam mewujudkan pengawasan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel dimana Pemerintah berkewajiban memberikan penghargaan kepada pemerintah daerah yang memiliki indeks pengelolaan keuangan daerah yang terbaik. Berdasarkan SK Kementerian Dalam Negeri Nomor 900.1.15.3-387 Tahun 2023 tentang Hasil Pengukuran Indeks Pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota seluruh Indonesia tahun 2023, Kabupaten Pasaman Barat dengan total Indeks 70,911 dengan nilai B kategori perlu perbaikan.

#### **3.8. Realisasi Anggaran**

Tujuan dan sasaran Bappelitbangda dituangkan ke dalam program, kegiatan dan sub kegiatan disesuaikan pada indikator yang akan dihasilkan (output). Program, kegiatan dan sub kegiatan mendapatkan alokasi anggaran yang nantinya direalisasikan sebagai implementasi kinerja keuangan dan capaian fisik kinerja Bappelitbangda Kabupaten Pasaman Barat, Target dan realisasi program, kegiatan dan sub kegiatan disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 3.14 Capaian Realisasi Kinerja Bappelitbangda level Program/Kegiatan/Subkegiatan Tahun 2023

Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Kriteria Realisasi Kinerja
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100%	4.862.178.155	100%	4.423.146.812	100	90,97	Sangat Tinggi
1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Bappelitbangda	10 dokumen	45.719.900	10 dokumen	26.308.355	100	57,54	Sangat Tinggi
1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	8 dokumen	28.621.900	8 dokumen	19.295.355	100	67,41	Sangat Tinggi
2) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	2 laporan	17.098.000	2 laporan	8.013.000	100	46,86	Sangat Tinggi
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Peresentase penurunan jumlah temuan BPK atas laporan keuangan Bappelitbangda	100%	3.705.685.443	100	3.525.740.967	100	95,14	Sangat Tinggi
3) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	31 org/bln	3.500.645.443	31 org/bln	3.332.863.967	100	95,20	Sangat Tinggi
4) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	1 dokumen	114.800.000	1 dokumen	105.200.000	100	91,63	Sangat Tinggi
5) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 dokumen	90.240.000	1 dokumen	87.677.000	100	97,15	Sangat Tinggi
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Level Maturitas SPIP Bappelitbangda	3 level	44.325.000	level 3	35.320.000	100	79,68	Sangat Tinggi
6) Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen pengamanan barang milik Daerah SKPD	1 dokumen	31.225.000	1 dokumen	26.970.000	100	86,37	Sangat Tinggi
7) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	1 laporan	13.100.000	1 laporan	8.350.000	100	63,74	Sangat Tinggi
4. Administrasi Kepegawaiannya Perangkat Daerah	Level Maturitas SPIP Bappelitbangda	3 level	160.501.750	level 3	27.405.450	100	17,074	Sangat Tinggi
8) Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	0 paket	0	0 paket	-	0	0%	Sangat Rendah
9) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	1 orang	1.141.250	1 orang	1.108.750	100	97,15	Sangat Tinggi
10) Sosialisasi Peraturan Perundangan-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan Perundang-undangan	5 orang	105.755.500	0 orang	1.500.000	0	1,41	Sangat Rendah

Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Kriteria Realisasi Kinerja
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
11) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan Perundang-undangan	4 orang	53.605.000	4 orang	24.796.700	100	46,25	Sangat Tinggi
<b>5. Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Level Maturitas SPIP Bappelitbangda</b>	<b>3 level</b>	<b>347.755.912</b>	<b>level 3</b>	<b>314.458.805</b>	<b>100</b>	<b>90,42</b>	<b>Sangat Tinggi</b>
12) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan bangunan kantor	Jumlah paket komponen instalasi Listrik/ Penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 paket	8.840.000	1 paket	6.245.000	100	70,64	Sangat Tinggi
13) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 paket	29.776.500	1 paket	27.995.000	100	94,01	Sangat Tinggi
14) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	1 paket	18.447.812	1 paket	17.079.500	100	92,58	Sangat Tinggi
15) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 paket	22.691.600	1 paket	16.120.500	100	71,04	Sangat Tinggi
16) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	1 laporan	268.000.000	1 laporan	247.018.805	100	92,17	Sangat Tinggi
<b>6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Level Maturitas SPIP Bappelitbangda</b>	<b>3 level</b>	<b>131.965.400</b>	<b>level 3</b>	<b>127.915.000</b>	<b>100</b>	<b>96,93</b>	<b>Sangat Tinggi</b>
17) Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	0 unit	0	0 unit	-	0	0	Sangat Rendah
18) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	1 unit	131.965.400	19 unit	127.915.000	100	96,93	Sangat Tinggi
<b>7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Level Maturitas SPIP Bappelitbangda</b>	<b>3 level</b>	<b>172.417.250</b>	<b>level 3</b>	<b>131.583.826</b>	<b>100</b>	<b>76,31</b>	<b>Sangat Tinggi</b>
19) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	1 laporan	135.670.250	1 laporan	98.466.826	100	72,57	Sangat Tinggi
20) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	1 laporan	36.747.000	1 laporan	33.117.000	100	90,12	Sangat Tinggi
<b>8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Level Maturitas SPIP Bappelitbangda</b>	<b>3 level</b>	<b>253.807.500</b>	<b>level 3</b>	<b>234.414.409</b>	<b>100</b>	<b>92,35</b>	<b>Sangat Tinggi</b>
21) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang diperlihara dan dibayarkan pejaknya	22 unit	196.902.500	20 unit	184.498.409	91	93,70	Sangat Tinggi

Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Kriteria Realisasi Kinerja
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
22) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	51 unit	37.065.000	42 unit	30.116.000	82	81,25	Tinggi
23) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 unit	19.840.000	1 unit	19.800.000	100	99,79	Sangat Tinggi
<b>2. PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>Percentase kesesuaian dokumen perencanaan daerah (RPJMD dan RKPD) dengan dokumen perencanaan perangkat daerah</b>	<b>97%</b>	<b>572.870.050</b>	<b>100</b>	<b>376.921.653</b>	<b>100</b>	<b>65,79</b>	<b>Sangat Tinggi</b>
<b>1. Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan</b>	<b>Percentase pencapaian nilai komponen perencanaan pada penilaian SAKIP</b>	<b>81%</b>	<b>425.514.150</b>	<b>77,73%</b>	<b>315.548.260</b>	<b>95,96</b>	<b>74,15</b>	<b>Sangat Tinggi</b>
24) Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (sesuai kebutuhan jika RPJMD maka rancangan Teknokratik)	1 dokumen	63.443.750	1 dokumen	43.181.410	100	68,06	Sangat Tinggi
25) Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/ Lintas SKPD	Jumlah berita acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	20 BA	3.885.000	20 BA	3.880.000	100	99,87	Sangat Tinggi
26) Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/ Kota	Jumlah berita acara Musrenbang Kabupaten/Kota	1 BA	14.335.000	1 BA	14.320.000	100	99,89	Sangat Tinggi
27) Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah usulan yang terverifikasi oleh Kecamatan	110 usulan	27.900.000	110 usulan	13.155.350	100	47,15	Sangat Tinggi
28) Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	3 dokumen	315.950.400	3 dokumen	241.011.500	100	76,28	Sangat Tinggi
<b>2. Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>Percentase pencapaian nilai komponen perencanaan pada penilaian SAKIP</b>	<b>81%</b>	<b>64.159.000</b>	<b>77,73</b>	<b>18.204.043</b>	<b>95,96</b>	<b>28,37</b>	<b>Sangat Tinggi</b>
29) Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah masukan analisis data untuk penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan daerah	10 masukan	35.159.000	10 masukan	10.889.643	100	30,97	Sangat Tinggi
30) Penyusunan Profil Pembangunan daerah Kabupaten/Kota	Jumlah buku profil pembangunan daerah yang diterbitkan	1 buku	29.000.000	1 buku	7.314.400	100	25,22	Sangat Tinggi
<b>3. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>Percentase capaian IKU daerah</b>	<b>100%</b>	<b>83.196.900</b>	<b>100</b>	<b>43.169.350</b>	<b>100</b>	<b>51,88</b>	<b>Sangat Tinggi</b>
31) Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah laporan hasil evaluasi kinerja pembangunan daerah	3 laporan	83.196.900	3 laporan	43.169.350	100	51,88	Sangat Tinggi

Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Kriteria Realisasi Kinerja
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
3. PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Percentase OPD dengan nilai dokumen perencanaan minimal baik	85%	639.180.650	100	546.822.451	100	85,55	Sangat Tinggi
1. Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Percentase tingkat keselarasan dokumen perencanaan jangka menengah dan tahunan daerah dengan dokumen perencanaan Perangkat Daerah	85%	348.683.950	100	264.076.654	100	75,73	Sangat Tinggi
32) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 dokumen	49.155.000	1 dokumen	30.656.600	100	62,36	Sangat Tinggi
33) Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan asistensi dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah	31 PD	73.219.600	31 PD	47.695.430	100	65,14	Sangat Tinggi
34) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1 laporan	62.738.400	1 laporan	45.845.720	100	73,07	Sangat Tinggi
35) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1 laporan	40.094.450	1 laporan	28242100	100	70,43	Sangat Tinggi
36) Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah laporan hasil sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada bidang pembangunan manusia	1 laporan	123.476.500	1 laporan	111.636.804	100	90,41	Sangat Tinggi
2. Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Percentase tingkat keselarasan dokumen perencanaan jangka menengah dan tahunan daerah dengan dokumen perencanaan Perangkat Daerah	85%	51.798.100	100	53.710.350	100	103,69	Sangat Tinggi
37) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian yang dikoordinir penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 dokumen	51.798.100	1 dokumen	53.710.350	100	103,69	Sangat Tinggi

Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Kriteria Realisasi Kinerja
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
3. Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayah	Percentase tingkat keselarasan dokumen perencanaan jangka menengah dan tahunan daerah dengan dokumen perencanaan Perangkat Daerah	85%	238.698.600	100	229.035.447	100	95,95	Sangat Tinggi
38) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur yang dikoordinir penyusunannya (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	1 dokumen	78.536.880	1 dokumen	72.188.300	100	91,91	Sangat Tinggi
39) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	1 laporan	120.638.950	1 laporan	119.113.000	100	98,73	Sangat Tinggi
40) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayah (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang kewilayah yang dikoordinir penyusunannya (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	1 dokumen	39.522.770	1 dokumen	37.734.147	100	95,47	Sangat Tinggi
1. PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Percentase hasil kelitbangan yang ditindaklanjuti	80%	225.960.700	100%	176.069.060	100	77,92	Sangat Tinggi
1. Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Percentase implementasi kelitbangan	100%	98.960.500	100	79.251.150	100	80,08	Sangat Tinggi
41) Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah data kelitbangan dan peraturan yang terkola dengan baik	1 laporan	98.960.500	1 laporan	79.251.150	100	80,08	Sangat Tinggi
2. Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah Inovasi OPD yang didaftarkan pada ajang IGA	Inovatif	127.000.200	Inovatif	96.817.910	100	76,23	Sangat Tinggi
42) Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah laporan hasil pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	1 laporan	127.000.200	1 laporan	96.817.910	100	76,23	Sangat Tinggi
Total			6.300.189.555		5.522.959.976	94,59548387	87,66%	Sangat Tinggi

Sumber : data diolah, Bappelitbangda 2024

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

1. Terdapat 3 sasaran strategis dengan 9 indikator sasaran. Dari 9 indikator sasaran, terdapat dua indikator sasaran yang tidak mencapai target yang telah ditetapkan, yaitu Persentase Capaian IKU Daerah dan Persentase pencapaian nilai komponen perencanaan pada penilaian SAKIP. Sementara 7 indikator sasaran lainnya berhasil mencapai target.
2. Anggaran Bappelitbangda berdasarkan Renja Bappelitbangda tahun 2023 adalah sebesar Rp6.151.421.530,00 mendapatkan tambahan untuk pembayaran Honorarium Tim Penyusun RPJPD Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2025-2045 dan RKPD Tahun 2024 menjadi Rp6.300.189.555,00 pada Perubahan Renja Bappelitbangda tahun 2023. Pembayaran honorarium tidak dibayarkan 100% sesuai rencana karena adanya efisiensi. Realisasi anggaran Bappelitbangda tahun 2023 sebesar Rp5.522.959.976,00 atau sebesar 87,66%. Capaian ini mendapat predikat **Tinggi**.
3. Bappelitbangda melaksanakan 4 Program sesuai Renja Bappelitbangda tahun 2023 dengan 16 kegiatan dan 42 subkegiatan. Secara umum, hampir setiap subkegiatan mendapatkan efisiensi anggaran untuk menambah defisit anggaran di Kabupaten. Meski begitu, capaian fisik/output Bappelitbangda tahun 2023 berhasil tercapai sebesar 94,59% atau berpredikat **Sangat Tinggi**.
4. Keberhasilan pencapaian target indikator sasaran didukung oleh adanya keseriusan bersama melakukan perbaikan kualitas dokumen perencanaan melalui peningkatan koordinasi dan reviu berlapis oleh PIC di Bappelitbangda Kabupaten Pasaman Barat, Inspektorat, BKAD dan Kemenkumham serta peningkatan pengendalian melalui evaluasi berkala per triwulan. Selain itu, pemanfaatan teknologi berbasis aplikasi pada tahap perencanaan mulai terarah, sistematis dan terintegrasi. Untuk peningkatan inovasi ditunjukkan dengan tingginya semangat berinovasi oleh OPD/Kecamatan/Nagari/Puskesmas. Adapun hambatan terhadap pencapaian indikator sasaran masih terdapat indikator kinerja yang pengukuran defisinya operasionalnya belum terukur secara tepat sehingga nilai SAKIP dan IKU masih rendah.

#### **4.2 Strategi dan Pemecahan Masalah**

Untuk meningkatkan kinerja Bappelitbangda Kabupaten Pasaman Barat pada masa yang akan datang, perlu strategi untuk pemecahan masalah yang timbul pada saat ini antara lain:

1. Mendorong efektivitas pelaksanaan SAKIP di Kabupaten Pasaman Barat.
2. Menyelaraskan indikator sasaran/program/kegiatan/subkegiatan dengan Renstra PD, perjanjian kinerja dan Indikator Utama.
3. Memanfaatkan teknologi berbasis aplikasi dalam mengevaluasi untuk memudahkan proses pengendalian pencapaian kinerja oleh pimpinan.
4. Meningkatkan pelayanan dan konsultasi oleh PIC Bappelitbangda dalam rangka peningkatan kualitas dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah.
5. Mengoptimalkan klinik inovasi bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagai fasilitator dalam penginputan inovasi daerah.
6. Meningkatkan kualitas JF Peneliti dan mendukung Peneliti baik secara anggaran maupun komitmen pimpinan untuk menghasilkan data dan kajian berkualitas dalam rangka menunjang perencanaan pembangunan.

# **LAMPIRAN**

## 1. Penilaian Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

No.	Perangkat Daerah (PD)	2021	2022	2023
1	Sekretariat Daerah	Baik	Buruk	Baik
2	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Baik	Buruk	Baik
3	Inspektorat	Baik	Buruk	Baik
4	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Baik	Sangat Baik	Sangat Baik
5	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	Baik	Baik	Baik
6	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Baik	Baik	Baik
7	Badan Pendapatan Daerah	Baik	Baik	Baik
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Baik	Baik	Baik
9	Dinas Pendidikan	Baik	Buruk	Buruk
10	Dinas Kesehatan	Baik	Baik	Baik
11	Dinas Komunikasi dan Informatika	Baik	Baik	Baik
12	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Baik	Baik	Baik
13	Dinas Lingkungan Hidup	Baik	Baik	Baik
14	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Baik	Baik	Baik
15	Dinas Perumahan dan Pemukiman	Baik	Baik	Baik
16	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Baik	Baik	Baik
17	Dinas Pengendalian Penduduk KB dan P3A	Baik	Baik	Sangat Baik
18	Dinas Koperasi dan UKM	Baik	Baik	Baik
19	Satuan Polisi Pamong Praja	Buruk	Buruk	Sangat Buruk
20	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Baik	Sangat Baik	Sangat Baik
21	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Buruk	Sangat Buruk	Baik
22	Dinas Pariwisata	Baik	Baik	Buruk
23	Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura	Baik	Baik	Baik
24	Dinas Perkebunan dan Peternakan	Baik	Baik	Baik
25	Kesbangpol	Baik	Baik	Baik
26	Dinas Ketahanan Pangan	Baik	Baik	Sangat Baik
27	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari	Baik	Baik	Baik
28	Dinas Perhubungan	Baik	Baik	Baik
29	Dinas Sosial	Buruk	Buruk	Buruk
30	Dinas Tenaga Kerja	Baik	Sangat Baik	Sangat Baik
31	Dinas Perikanan	Baik	Baik	Baik
32	Kecamatan Pasaman	Baik	Buruk	Baik
33	Kecamatan Luhak Nan Duo	Baik	Baik	Baik
34	Kecamatan Sasak Ranah Pasisie	Baik	Baik	Baik
35	Kecamatan Kinali	Baik	Baik	Baik
36	Kecamatan Talamau	Baik	Baik	Baik
37	Kecamatan Gunung Tuleh	Baik	Baik	Baik
38	Kecamatan Sungai Aua	Baik	Baik	Buruk
39	Kecamatan Lembah Melintang	Baik	Baik	Baik
40	Kecamatan Koto Balingka	Baik	Buruk	Baik
41	Kecamatan Sungai Beremas	Baik	Baik	Baik
42	Kecamatan Ranah Batahan	Baik	Buruk	Baik
<b>Ketercapaian Indikator</b>				
	PD dengan nilai dokumen perencanaan minimal baik	39 PD	32 PD	37 PD
	PD dengan nilai dokumen perencanaan buruk	3 PD	10 PD	5 PD

	Tingkat Keselarasan Dokumen Perencanaan PD (Jumlah PD dengan nilai dokumen perencanaan minimal baik / Jumlah PD x 100%)	92,86%	76,19	88,09
	Rerata Capaian (Nilai)	75,27%	73,21%	76,71%

## 2. Capaian Indikator IKU Daerah

No.	IKU Daerah	2021	2022	2023
1	Indeks Reformasi Birokrasi	CC (49,19)	CC (56,20)	CC (54,63)
2	Opini BPK atas laporan keuangan daerah	WTP	WTP	WTP
3	Nilai SAKIP	B (60,82)	62,24	62,70
4	Level Maturitas SPIP	2,83	3,132	3,132
5	Tingkat Kapabilitas APIP	2,5	2,8	2,9
6	Indeks Profesionalitas ASN	67,13	67,07	62,32
7	Indeks Maturitas SPBE	2,18	2,36	2,82
8	Indeks Kepuasan Masyarakat (%)	NA	80,8	81,66
9	Angka Kriminalitas (per 10.000 penduduk)	13,72	13,72	17,55
10	% Capaian PASBAR Mengaji	NA	0	40,91
11	Adat, seni dan budaya yang dilestarikan	3	6	11
12	Indeks Pembangunan Gender	90,26	90,17	90,17
13	Predikat Kabupaten Peduli HAM	Sangat Peduli (SP)	Sangat Peduli (SP)	Peduli (P)
14	Indeks Pemberdayaan Gender	60,16	60,38	61,05
15	Predikat Kabupaten Layak Anak	Madya	Madya (649)	Madya (605)
16	Indeks Ketahanan Daerah	1,35	1,50	0,3
17	Indek Pembangunan Manusia	68,76	69,57	72,03
18	Rata-rata lama sekolah (th)	8,27	8,55	8,81
19	Rata-rata harapan lama sekolah (th)	98,20	13,69	13,70
20	Usia Harapan Hidup (th)	67,94	68,25	72,44
21	Prevalensi Stunting (%)	18,4	35,50	14,30
22	Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	1,08	1,41	1,50
23	Indeks Gini	0,261	0,28	0,238
24	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	3,75	4,17	4,33
25	% Penduduk Miskin	7,51	6,93	6,92
26	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,03	6,33	6,01
27	PDRB per Kapita ADHB (Rp. juta)	36,51	39,08	43,43
Ketercapaian Indikator				
	IKU tercapai (100%)	11 IKU	12 IKU	13 IKU
	IKU tidak tercapai (100%)	16 IKU	15 IKU	14 IKU
	Capaian IKU Daerah (Jumlah IKU tercapai / Jumlah IKU x 100%)	40,74%	44,44%	48,15
	Rerata Capaian	95,98%	93,61%	93,91%